

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Probolinggo Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kota Probolinggo untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
6. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

- (1) RPIK disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri yang berwawasan lingkungan di Daerah
- (2) RPIK disusun sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu dan sistematika;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. industri makanan minuman;
 - b. industri tekstil dan pakaian jadi;
 - c. industri pengolahan hasil laut;
 - d. industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
 - e. industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman;
 - f. industri bahan kimia, barang dari kimia; dan
 - g. industri barang galian bukan logam.
- (3) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (4) Isi dan Uraian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 115-4/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Berdasarkan fakta makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Sama halnya dengan pendapatan perkapita Kota Probolinggo, secara relatif juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Selain itu, perlu percepatan penurunan angka pengangguran di Kota Probolinggo. Namun demikian, kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kota Probolinggo. Sedangkan distribusi pendapatan relatif merata. Kondisi ini memberikan isyarat bahwa mayoritas penduduk di Kota Probolinggo tergolong penduduk hampir miskin. Dengan demikian, percepatan pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo memiliki peran strategis dan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sektor Industri mampu menjadi alternatif akselerator pertumbuhan ekonomi dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan merata. Sehingga, pembangunan industri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

Selain itu, berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kota Probolinggo merupakan salah satu Kawasan Prioritas Bromo – Tengger – Semeru yang fokus terhadap pengembangan pada potensi sektor pariwisata, agroproduksi, dan agroindustri. Dimana, kawasan Prioritas Bromo – Tengger - Semeru berfungsi sebagai penyangga sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata di Jawa Timur. Dengan demikian, Kota Probolinggo perlu mempersiapkan revitalisasi industri berbasis keunggulan lokal sebagai prioritas pembangunan kedepan.

Namun, menjadikan sektor industri sebagai sektor penggerak utama aktivitas ekonomi Kota Probolinggo masih menjadi tantangan utama dalam proses industrialisasi. Keresahan sosial ekonomi, seperti masalah perburuhan, berpotensi terjadi di Kota Probolinggo. Selain itu, potensi konflik pemanfaatan lahan industri dan pemukiman sangat tinggi. Hal ini disebabkan semakin sempitnya lahan yang dapat dijadikan lokasi pengembangan industri, sedangkan kebutuhan lahan untuk pemukiman semakin besar. Selain itu, industrialisasi yang tidak direncanakan dengan matang justru berpotensi akan menyebabkan inefisiensi pembangunan infrastruktur, menurunkan kualitas lingkungan hidup, dan bahkan tidak terkait sama sekali dengan sektor pertanian.

Dengan demikian, penyusunan RPIK Probolinggo diharapkan mampu memberikan arahan dan informasi yang jelas untuk proses pembangunan industri. Sehingga, percepatan industrialisasi mampu menjadi pendorong perekonomian dan menciptakan pembangunan ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat, serta menciptakan harmonisasi antar sektor ekonomi sehingga tidak terjadi tumpang tindih sektor spasial.

Ditinjau dari aspek demografis, Kota Probolinggo memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup melimpah. Namun, ketersediaan tenaga kerja tersebut didominasi lulusan sekolah menengah. Dengan demikian, pembangunan industri Kota Probolinggo kedepan harus mampu mengakomodasi kondisi demikian. Harapannya, pembangunan Industri yang pesat dapat berimplikasi pula pada perluasan penyerapan tenaga kerja.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Daerah untuk membangun Industri yang unggul. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakaturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Probolinggo diharapkan mampu mengantisipasi adanya lima potensi dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu: (i) potensi munculnya masalah perburuhan, (ii) potensi terjadinya konflik pemanfaatan lahan, (iii) potensi pemanfaatan infrastruktur yang tidak optimal; dan (iv) potensi terjadinya lingkungan perkotaan yang buruk.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kota

(RPIK) Probolinggo Tahun 2023-2043. RPIK ini disusun dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur.

RPIK ini memiliki visi “*Menuju Kota Industri yang Tangguh dan Berkelanjutan*”. Demi mewujudkan visi tersebut, terdapat tiga misi yang diusung, yakni:

1. meningkatkan pendapatan perkapita yang inklusif;
2. mewujudkan industri yang berbasis keunggulan lokal; dan
3. mewujudkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. meningkatkan investasi di sektor industri;
2. meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. meningkatkan pangsa pasar sektor industri pada tingkat nasional dan internasional;
4. menumbuhkan industri yang berbasis potensi sumber daya Daerah; dan
5. meminimalkan dampak lingkungan akibat pembangunan industri.

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo;
4. Potensi sumber daya industri Daerah;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap pertama (2023-2028) adalah percepatan peningkatan investasi industri. Tahap kedua (2029-2033) adalah penguatan penggunaan bahan baku lokal. Tahap ketiga (2034-2038)

adalah penguatan *brand image* produk industri Daerah. Tahap keempat (2039-2043) adalah terwujudnya kota industri kreatif pusat metropolitan Bromo – Tengger – Semeru. Selain itu, pada tahap ini diharapkan telah terwujud daerah yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu, *smart governance* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Probolinggo Tahun 2023-2043.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA PROBOLINGGO TAHUN
2023-2043

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. **Pertama**, penyusunan rencana pembangunan industri merupakan pelaksanaan arahan dalam UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mengarahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level kabupaten/kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selain itu, dokumen RPIK Probolinggo perlu disusun karena adanya arahan pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2019 Tentang RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039. Dimana, pada Pasal 11 ayat (4) secara tersurat mengarahkan pemerintah kabupaten/kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tersebut diundangkan.

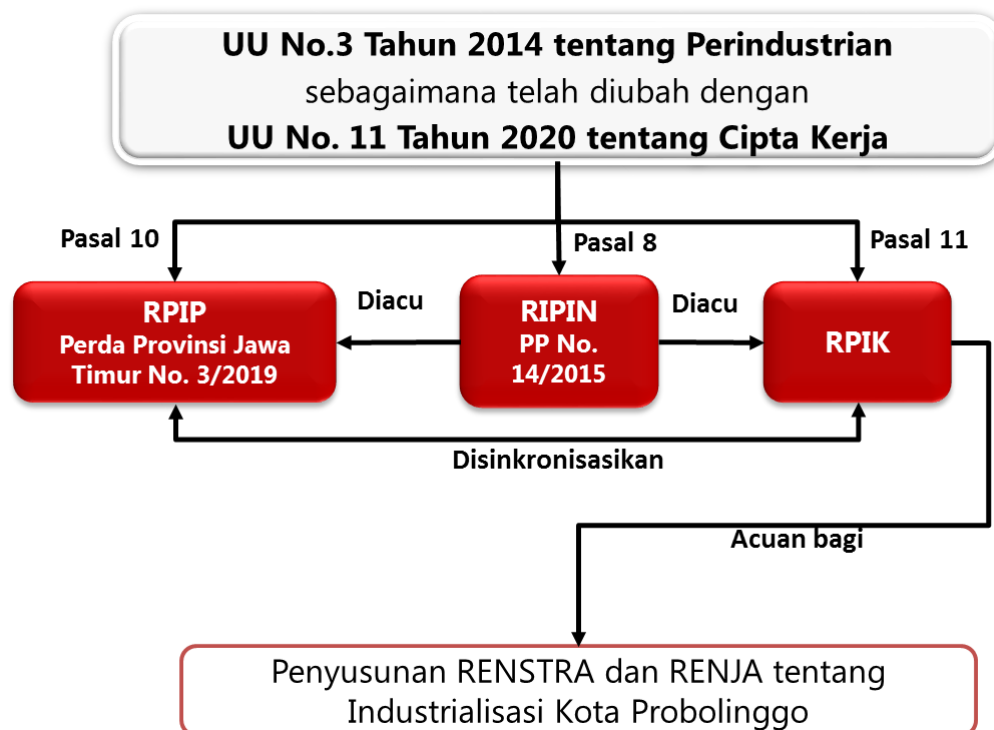
Kedua, perlunya segera menyusun dokumen RPIK Probolinggo dapat ditinjau dari alasan akademis. Dimana, terdapat dua hal yang mendasari alasan ini, yaitu: (i) RPIK disusun sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi dampak negatif industrialisasi bagi pembangunan ekonomi Kota Probolinggo, dan (ii) RPIK disusun untuk untuk memaksimalkan peranan industri dalam percepatan pembangunan ekonomi Kota Probolinggo.

Alasan **Ketiga**, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan untuk mewujudkan Probolinggo sebagai salah satu daerah industri yang mandiri. Gelombang revolusi industri 4.0 ini tidak mungkin dihindari, khususnya pada era keterbukaan ekonomi global. Sehingga, pembangunan industri yang berkarakteristik digital tidak bisa diabaikan, jika tetap mengharapkan adanya pembangunan industri Kota Probolinggo yang berdaya saing. Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) usaha yang tinggi dan ketidakteraturan perubahan iklim usaha sulit diprediksi (*unpredictable*). Artinya, ekosistem industrialisasi menuntut adanya pengelolaan industri yang fleksibel, khususnya pada aspek regulasi. Sehingga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang lebih mutakhir (*advance*) sangat dibutuhkan, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

B. DASAR HUKUM

Aspek yuridis dalam dokumen ini menyangkut dasar hukum yang mengatur RPIK Probolinggo 2023-2043. Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (2) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; dan Pasal 11 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, Pasal 5 bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Potensi sumber daya Industri Daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.



Sumber: Penulis, diolah

Gambar 1.1 RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039, Pasal 11 ayat (4) bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan. Adanya peraturan tersebut mendorong percepatan penyusunan rencana pembangunan industri setiap daerah di Jawa Timur.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Probolinggo 2023-2043 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika yang disusun dalam RPIK Probolinggo 2023-2043 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Probolinggo.

B. Dasar Hukum

Menguraikan aspek yuridis yang melatar belakangi penyusunan RPIK Probolinggo 2023-2043.

C. Sistematika Penulisan

Mencakup: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; BAB III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Probolinggo; BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Probolinggo; BAB V Penutup.

BAB II: GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografis, serta aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, pembiayaan industri. Di sisi lain juga menampilkan masalah terkait.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan transportasi. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Menguraikan tentang pengembangan IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Selain itu juga menampilkan masalah terkait.

BAB III: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Probolinggo

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Probolinggo

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Probolinggo

Meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan nilai investasi.

BAB IV: STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROBOLINGGO

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Pengembangan Industri Unggulan

Penentuan industri unggulan Kota Probolinggo berdasarkan pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan Industri Unggulan Kota Probolinggo.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan, serta penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri selama 20 tahun kedepan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat potensi dan tantangan industrialisasi di Kota Probolinggo. Secara rinci, terdapat delapan potensi yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan industri Kota Probolinggo, yaitu:

1. Kemiskinan relatif rendah. Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kota Probolinggo relatif lebih rendah.
2. Distribusi pendapatan relatif merata. Dibandingkan dengan rasio gini Jawa Timur, rasio gini Kota Probolinggo relatif lebih rendah. Rasio ini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar individu. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antar pendapatan masyarakat.
3. Sektor industri sebagai sektor penyedia lapangan kerja yang terus meningkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor industri di Kota Probolinggo berpotensi menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang besar.
4. Peran industri makanan minuman cenderung meningkat. Sub sektor ini biasanya disumbang industri berskala kecil dan mikro.
5. Tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lulusan SMA atau sederajat cenderung meningkat.
6. Industri besar dan menengah menyebar pada seluruh kecamatan.
7. Telah ada pengaturan fungsi lahan, khususnya KPI. Artinya, Probolinggo telah mensinergikan peruntukan lahan bahkan pada tingkat kecamatan
8. Infrastruktur kota, seperti kualitas internet, jalan dan ketersediaan listrik terus meningkat.

Namun demikian, pada sisi yang lain, pembangunan industri Kota Probolinggo menghadapi empat tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perlunya percepatan peningkatan pendapatan perkapita dengan redistribusi pendapatan yang merata. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada tiga kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo masih relatif lebih rendah. Artinya, aktivitas perekonomian Kota Probolinggo masih belum secepat rata-rata daerah lain. Sehingga, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi melalui pembangunan sektor industri.
 - Peningkatan pendapatan perkapita. Dibandingkan pendapatan perkapita Jawa Timur, pendapatan perkapita Probolinggo masih relatif lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa secara relatif masyarakat Kota Probolinggo masih belum sejahtera dibandingkan dengan rata-rata daerah lainnya. Dikaitkan dengan angka kemiskinan yang juga rendah, maka secara umum masyarakat Kota Probolinggo berada sedikit diatas garis miskin, atau juga dapat dikatakan masyarakat yang hampir miskin. Sehingga, diperlukan pembangunan industri untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita Kota Probolinggo.
 - Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Meskipun terjadi kecenderungan penurunan pengangguran sejak 2014 dan bahkan lebih rendah dibandingkan Jawa Timur hingga 2016, namun pada dua tahun terakhir capaian TPT Kota Probolinggo berada diatas Jawa Timur. Pada titik ini, diperlukan penguatan peran industri dalam menyerap tenaga kerja yang lebih besar di Kota Probolinggo.
2. Percepatan pembangunan industri berbasis keunggulan lokal. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada empat kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - Peningkatan peran industri dalam perekonomian. Secara konsisten dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor industri dalam PDRB Kota Probolinggo adalah sekitar 16%.
 - Percepatan pertumbuhan sektor industri. Sejak 2014, pertumbuhan sektor industri di Kota Probolinggo konsisten tidak secepat pertumbuhan sektor industri Jawa Timur.

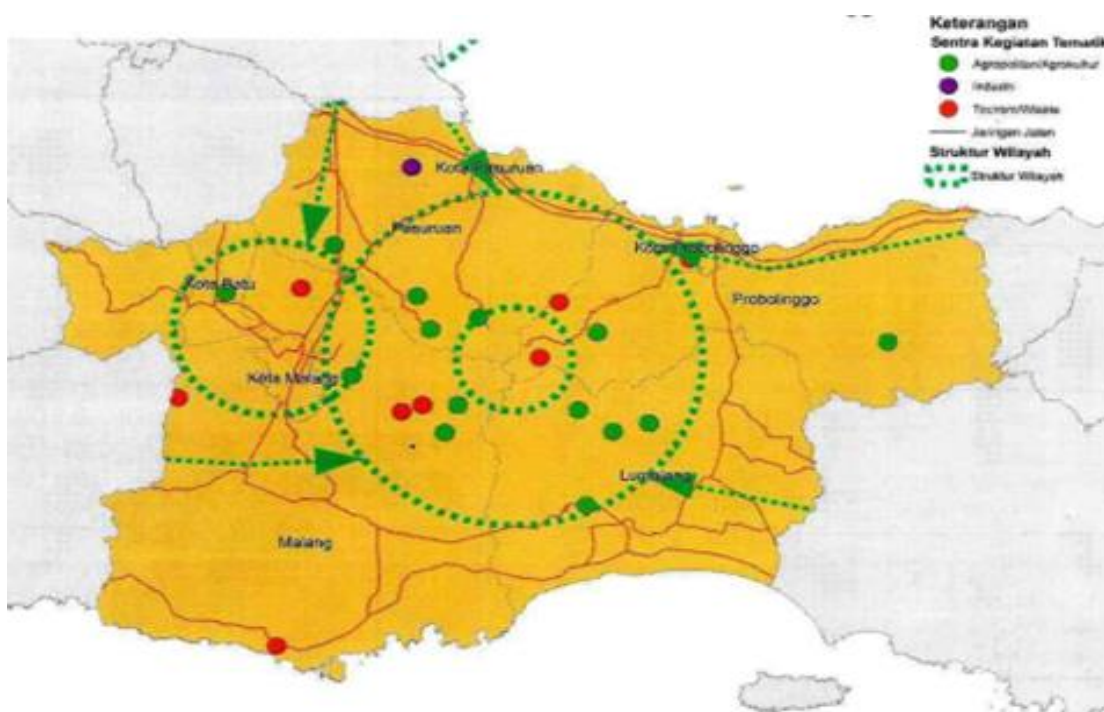
- Peningkatan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja khusus untuk yang berpendidikan tinggi, Probolinggo masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Artinya, ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang siap memasuki pasar tenaga kerja masih relatif sedikit.
 - Peningkatan investasi di sektor industri. Adanya peningkatan investasi industri diharapkan mampu mempercepat aktivitas industri di Kota Probolinggo.
3. Pentingnya pembangunan industri yang ramah lingkungan. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada kondisi bahwa kualitas lingkungan Kota Probolinggo walaupun cenderung terus membaik, namun masih perlu adanya percepatan perbaikan indek kualitas lingkungan hidup.

Pada dasarnya, potensi dan tantangan dalam pembangunan industri Probolinggo pada bahasan sebelumnya diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan lima aspek utama, yaitu: (i) kondisi daerah, (ii) sumber daya industri, (iii) sarana prasarana, (iv) perwilayahan industri, dan (v) pemberdayaan industri. Untuk itu, berikut disajikan analisis lebih mendalam terkait kelima aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Probolinggo dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri.

A. KONDISI DAERAH

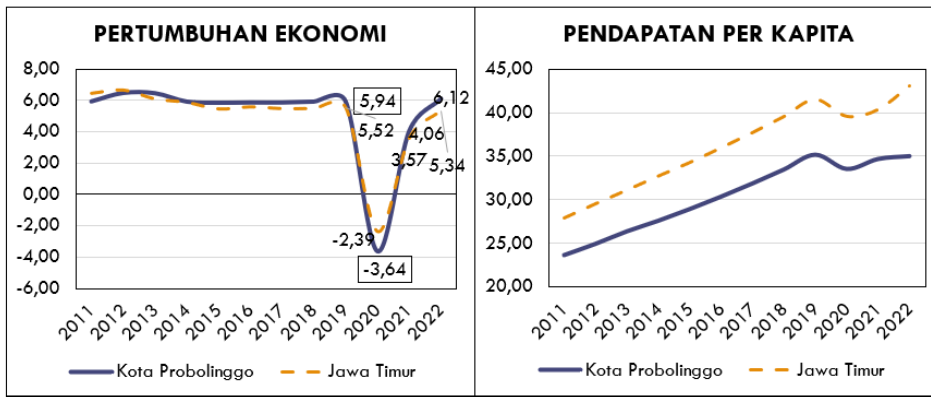
Kajian tentang kondisi daerah Probolinggo dalam upaya mendorong pembangunan sektor industri nampaknya tidak terlepas dari aspek geografisnya. Berdasarkan posisi geografis, Kota Probolinggo relatif strategis untuk mendukung pembangunan industri. Kota Probolinggo berada pada jalur pantura yang menghubungkan transportasi Jawa – Bali. Sementara itu, batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi: (i) Sebelah Utara: Selat Madura; (ii) Sebelah Timur: Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo; (iii) Sebelah Selatan: Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo; dan (iv) Sebelah Barat: Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Dilihat dari sisi sistem perkotaan nasional, Kota Probolinggo berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Secara administratif Kota Probolinggo terdiri dari 29 kelurahan yang terdiri dari 5 kecamatan, yakni: (i) Kecamatan Kademangan, (ii) Kecamatan Kedopak, (iii) Kecamatan Wonoasih, (iv) Kecamatan Mayangan, dan (v) Kecamatan Kanigaran. Dimana, kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kedopak dengan luasan 13.624 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mayangan dengan luasan 8.655 km².

Mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Kota Probolinggo merupakan salah satu Kawasan Prioritas Bromo – Tengger – Semeru yang pengembangannya berfokus pada potensi sektor pariwisata, agroproduksi, dan agroindustri. Dimana, kawasan Prioritas Bromo – Tengger - Semeru berfungsi sebagai penyangga sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata di Jawa Timur. Arahan tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan industri kedepan di Kota Probolinggo juga harus bersifat memperkuat peranan pertanian dalam perekonomian. Dalam kata lain, pembangunan industri Probolinggo harus memiliki keterkaitan yang erat dengan pertanian dan memberikan nilai tambah yang lebih besar pada produk pertanian. Secara umum, dengan keuntungan geografis ini, memberikan peluang besar bagi Kota Probolinggo menjadi salah satu pengungkit perekonomian Jawa Timur pada masa mendatang. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Probolinggo diusulkan sebagai salah satu daerah pada Kawasan Bromo – Tengger – Semeru.



Sumber: Perpres Nomor 80 Tahun 2019
 Gambar 2.1 Peta Kawasan Bromo – Tengger – Semeru

Melihat lebih jauh tentang daya dukung industri Probolinggo, nampaknya tidak terlepas dari kajian kondisi makro ekonomi daerah. Indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indikator lainnya memberikan informasi yang penting terkait peran vital industri di Probolinggo. Gambar 2.2 menyajikan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Probolinggo.



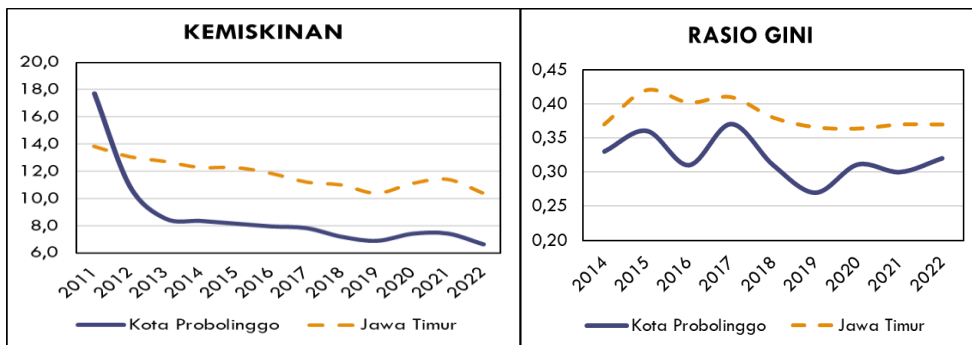
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.2 (A) Pertumbuhan Ekonomi dan (B) Pendapatan perkapita

Berdasarkan Gambar 2.2 Panel A, pada tahun 2022, perekonomian Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan akibat sektor perekonomian yang juga mulai pulih dari serangan awal pandemi. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa Kota Probolinggo tidak perlu mendapat perhatian untuk pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya, tahun 2022 ini mungkin dapat menjadi momentum untuk menjadikan sektor industri sebagai pendorong pertumbuhan Kota Probolinggo

Di sisi lain, pada Gambar 2.2 Panel B menunjukkan bahwa secara historis, pendapatan perkapita Kota Probolinggo masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kesejahteraan penduduk Kota Probolinggo masih lebih rendah dibandingkan kesejahteraan penduduk Jawa Timur secara umum. Artinya, tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Probolinggo masih perlu ditingkatkan. Maka diharapkan agar pembangunan industri dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Probolinggo.

Pada komponen makroekonomi yang lain, tingkat kemiskinan Kota Probolinggo lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (lihat pada Gambar 2.3 Panel A). Tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo cenderung menurun selama lima tahun terakhir sebelum pandemi, dengan laju penurunan relatif lebih cepat dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 kemiskinan mengalami penurunan. Sementara itu, mengacu pada Gambar 2.3 Panel B, Kota Probolinggo menunjukkan kondisi yang sedikit lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Rasio gini digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi melalui penyebaran pendapatan atau distribusi kekayaan di antara anggota populasi. Semakin kecil nilai rasio gini menunjukkan semakin kecil ketimpangan ekonomi atau tidak terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan orang kaya dengan orang miskin. Nilai rasio gini Kota Probolinggo sejak tahun 2014 berada di bawah rata-rata Jawa Timur, pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo telah optimal dalam menurunkan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan.

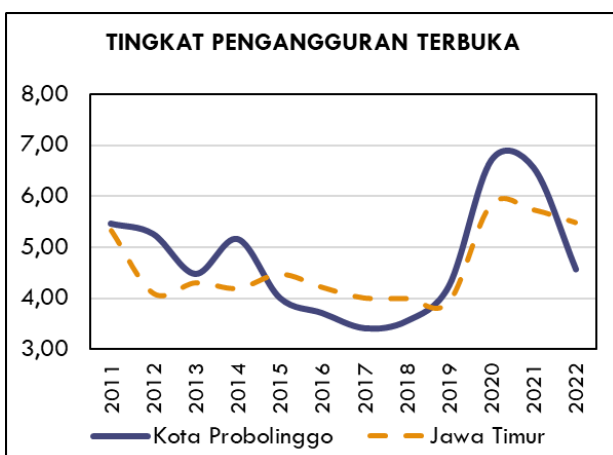


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.3 (A) Tingkat Kemiskinan dan (B) Rasio Gini

Adapun bila dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo yang ditunjukkan dengan pendapatan perkapita, maka kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk di Kota Probolinggo tergolong penduduk rentan miskin. Dengan demikian, percepatan pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo memiliki peran strategis dan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sektor industri mampu menjadi alternatif akselerator pertumbuhan ekonomi dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan merata. Sehingga, pembangunan industri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

Sementara itu, perlu percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Probolinggo. Sebelum terjadi pandemi, capaian kinerja penurunan TPT memang lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Namun, ketika terjadi pandemi, TPT Kota Probolinggo meningkat tajam bahkan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Dengan demikian, diharapkan sektor industri mampu menyerap banyak tenaga kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Adanya data yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita yang rendah dengan distribusi yang merata di Kota Probolinggo, memiliki makna bahwa secara rata-rata masyarakat Kota Probolinggo tergolong masyarakat yang belum

sejahtera. Sampai pada titik ini, tantangan utama yang sebenarnya dihadapi dalam industrialisasi di Kota Probolinggo adalah meningkatkan peran industri dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita khususnya bagi penduduk yang hampir miskin. Artinya, orientasi pembangunan tidak hanya tertuju pada pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga peningkatan pendapatan perkapita dan perluasan lapangan kerja. Hal ini cukup beralasan mengingat sektor industri dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah produk dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang (*forward and backward linkage*), sehingga manfaat tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Probolinggo.

Selanjutnya, pada komponen makroekonomi yang lain, yaitu neraca perdagangan, dapat dilihat bahwa proporsi impor Kota Probolinggo relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi ekspornya. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab besar ketergantungan aktivitas ekonomi Kota Probolinggo terhadap daerah lainnya. Dampaknya, aktivitas pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sangat rentan terhadap penurunan yang disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi luar daerah.

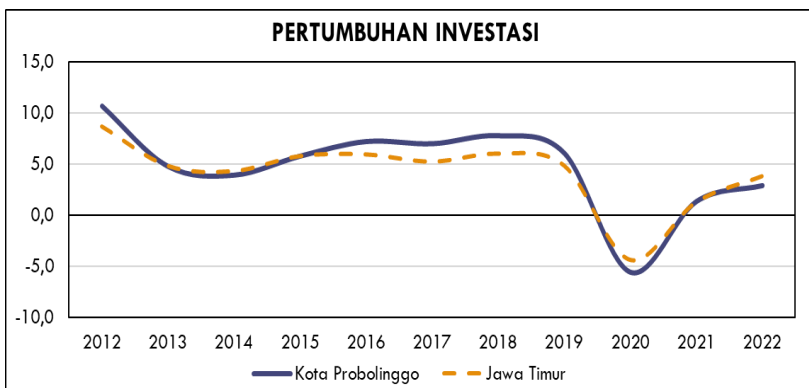


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.5 Neraca Perdagangan Kota Probolinggo

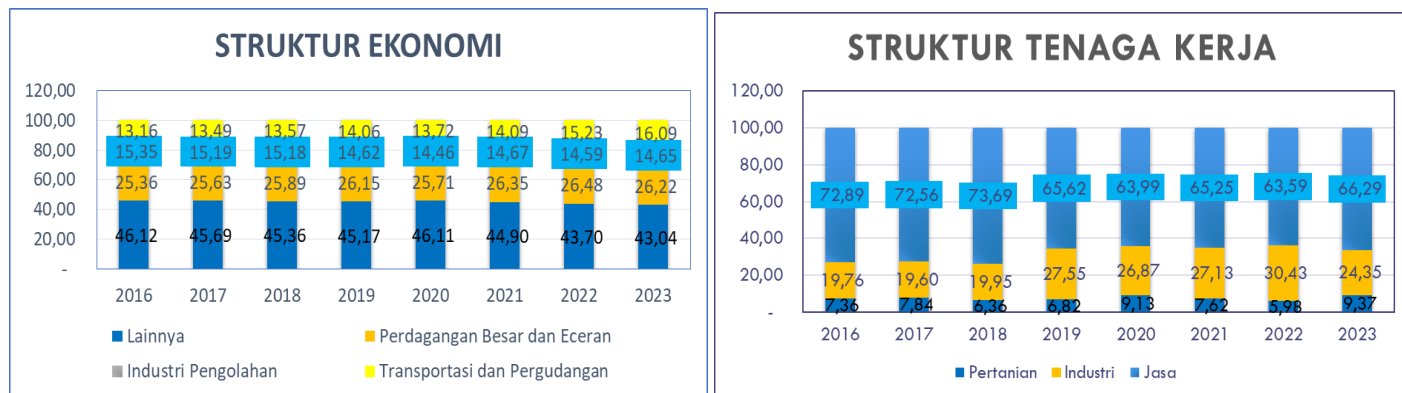
Salah satu hal yang dapat mempercepat aktivitas perekonomian dan menurunkan defisit neraca perdagangan di Kota Probolinggo, adalah upaya peningkatan investasi. Sebab, dengan adanya investasi, perekonomian daerah dapat terbangun dengan sendirinya secara mandiri. Berdasarkan data empiris, pertumbuhan investasi di Kota Probolinggo relatif lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Sebelum periode pandemi, pertumbuhan investasi Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan secara terus – menerus. Bahkan, pertumbuhan investasi relatif stabil pada kisaran 6 sampai 8 persen

selama 2016 – 2019. Namun, akibat pandemi, pertumbuhan investasi di Kota Probolinggo pada akhirnya mengalami penurunan. Pada tahun 2022, pertumbuhan investasi menunjukkan peningkatan walaupun belum mencapai kondisi seperti sebelum pandemi. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya upaya untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Data mengenai pertumbuhan investasi Kota Probolinggo dan Jawa Timur ditunjukkan oleh Gambar 2.6.



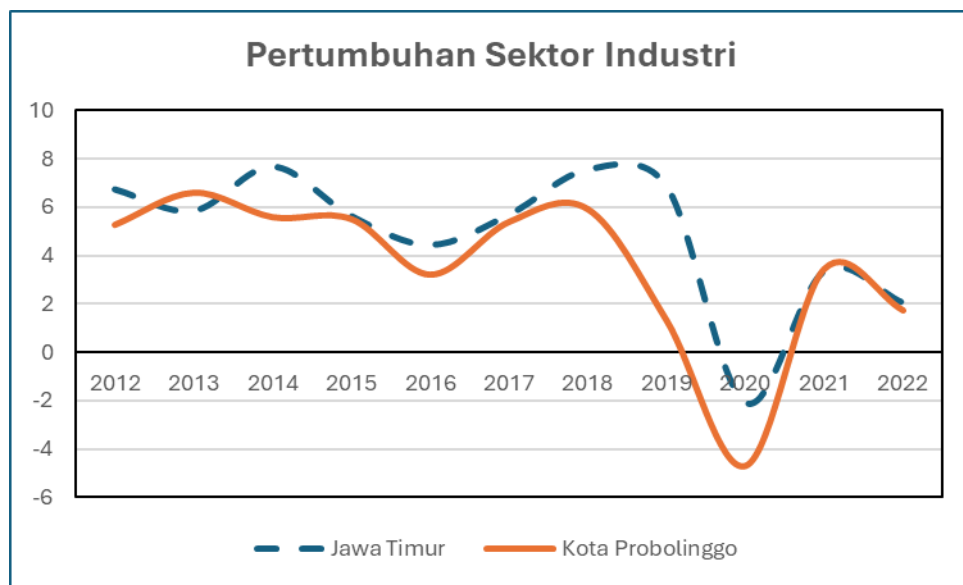
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023
 Gambar 2.6 Pertumbuhan Investasi (PMTB)

Dilihat dari kondisi aktivitas perekonomian, sektor yang mendukung perekonomian di Kota Probolinggo meliputi (i) sektor jasa, (ii) sektor industri, dan (iii) sektor pertanian. Dari ketiga sektor tersebut, sektor industri memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika kontribusi sektor industri di tahun 2019-2022 hanya empat belas koma lima puluh sembilan persen, yang notabene lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai empat belas koma enam puluh tujuh, justru dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak yaitu sekitar dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh delapan persen. Meskipun sektor industri pada umumnya memiliki kebutuhan permodalan yang cukup besar, menjadi tepat apabila investasi dan pembangunan ekonomi di Kota Probolinggo difokuskan untuk pertumbuhan sektor industri agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
 Gambar 2.7 (A) Struktur Ekonomi dan (B) Struktur Tenaga Kerja

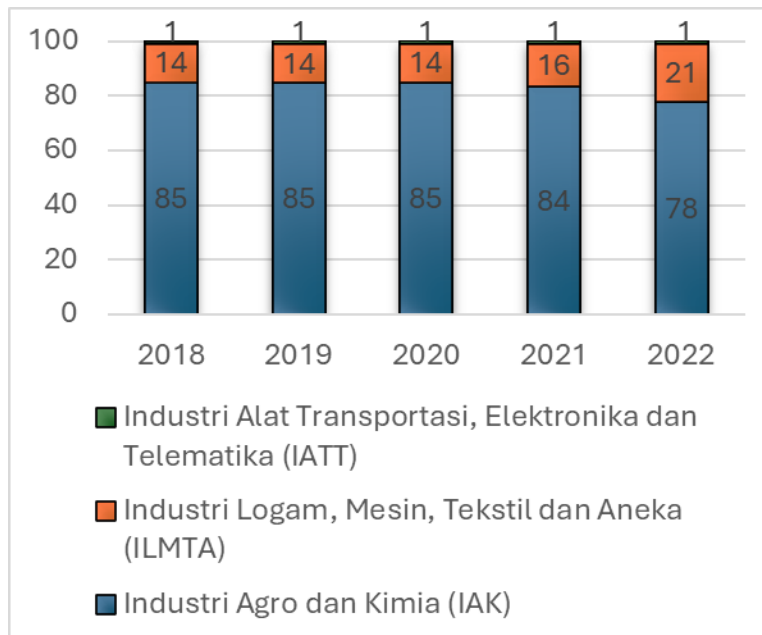
Namun, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan industri Kota Probolinggo ternyata masih berada dibawah kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Seperti yang diilustrasikan dalam Grafik 2.8, secara rata – rata, pertumbuhan industri Kota Probolinggo pada tahun 2012 – 2022 hanya mencapai 3,57%. Kemudian diperparah dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan industri terkontraksi menjadi negatif. Apalagi, dampak kontraksi negatif ini terjadi lebih parah di Kota Probolinggo jika dibandingkan dengan Jawa Timur secara umum. Melihat kondisi demografi masyarakat dan pentingnya peran sektor industri terhadap struktur tenaga kerja, maka pertumbuhan penguatan sektor industri masih perlu untuk menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi Kota Probolinggo kedepannya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.8 Pertumbuhan Industri

Berkaitan dengan daya dukung dan kondisi geografisnya, pembangunan industri di Kota Probolinggo didominasi oleh industri berbasis agropolitan. Kota Probolinggo didominasi sub sektor industri agro dan kimia (IAK) dengan kontribusi pada kisaran 70 persen-85 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.9 Struktur Industri

Terakhir, apabila mengacu pada kondisi demografis, Kota Probolinggo memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas. Populasi penduduk di Kota Probolinggo didominasi oleh penduduk dengan usia produktif 15–64 tahun sekitar 69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia non-produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif di Kota Probolinggo cukup rendah. Kondisi ini juga menyebabkan tingkat *dependency ratio* yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan Jawa Timur secara keseluruhan. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Probolinggo memiliki nilai yang cukup baik. Dengan tingkat pendidikan yang cukup baik, maka dapat diartikan bahwa, penduduk di Kota Probolinggo relatif siap dan mampu untuk dapat bekerja dalam industri. Kondisi demografis ini akan dibahas secara lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya, yaitu sumber daya industri.

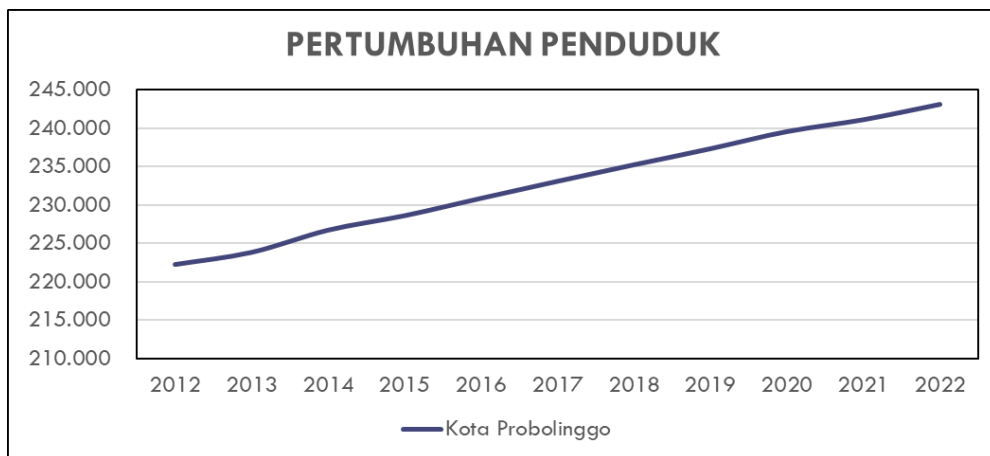
B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Dalam hal ini, terdapat lima komponen sumber daya industri, yaitu: (i) sumber daya manusia, (ii) sumber daya alam, (iii) teknologi, (iv) inovasi dan kreativitas, (v) pembiayaan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Sumber Daya Manusia merupakan pelaksana dan penentu keberhasilan proses pembangunan industrialisasi. Berdasarkan publikasi statistik, jumlah penduduk selama lima tahun terakhir di Kota Probolinggo cenderung mengalami peningkatan. Dimana, laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,06% dari tahun 2021.

Kepadatan penduduk di Kota Probolinggo di tahun 2021 adalah sebanyak 4.257 jiwa per km². Secara spesifik Kecamatan Mayangan mendominasi kepadatan penduduk terbanyak di Kota Probolinggo sebesar 7.127 jiwa per Km², dan di lain sisi Kecamatan Kedopok menyumbang kepadatan penduduk paling sedikit di Kota Probolinggo sebanyak 2.827 jiwa per Km².

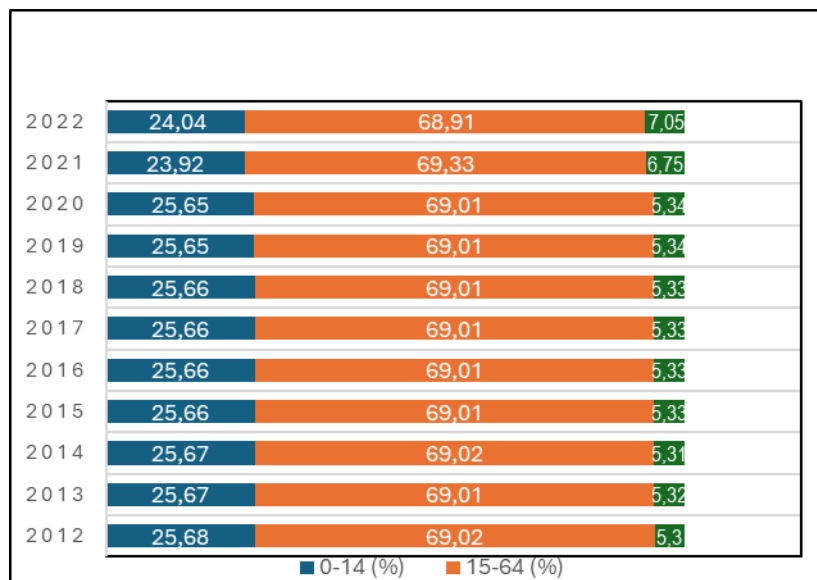


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.10 Pertumbuhan penduduk

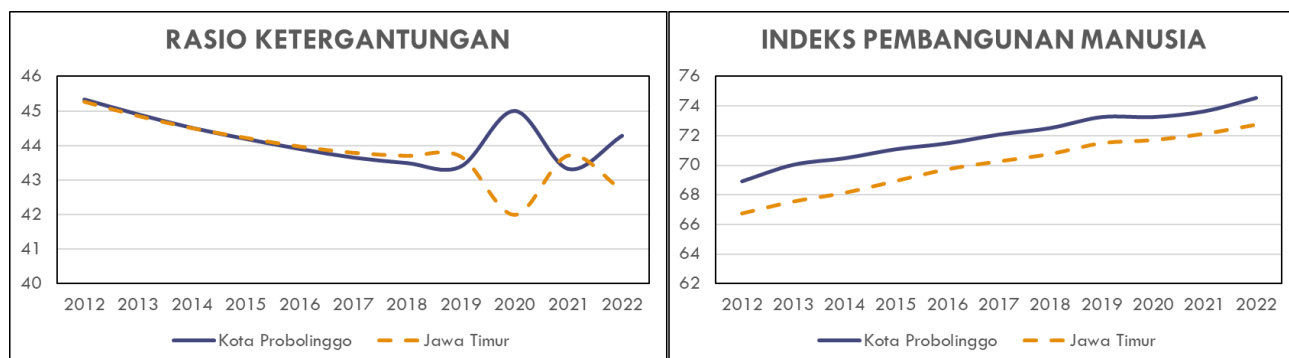
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Probolinggo. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya manusia di Kota Probolinggo dapat dimaksimalkan untuk percepatan pembangunan industri.

Selain jumlah penduduk secara umum, salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur. Dalam perencanaan pembangunan, jumlah penduduk menurut kelompok umur menjelaskan sebaran usia produktif dan non-produktif, sehingga dapat memetakan keberadaan sumber daya produktif pada suatu daerah.



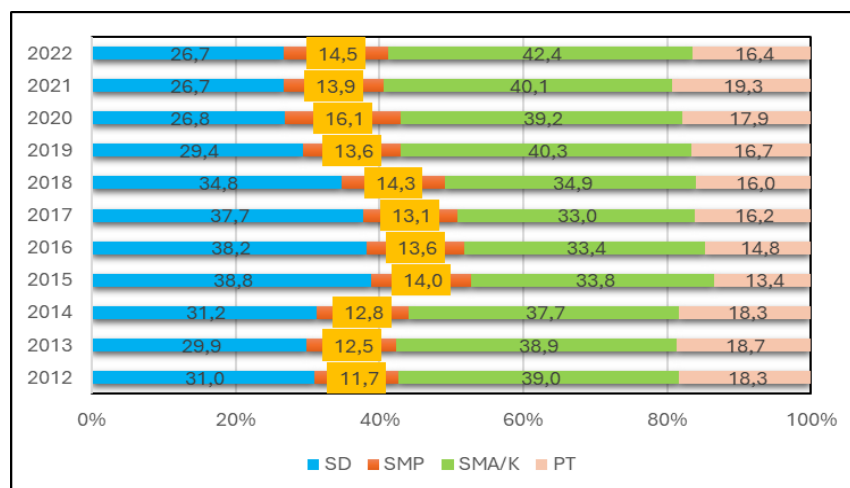
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023
 Gambar 2.11 Pertumbuhan penduduk

Pada Gambar 2.11 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Probolinggo dari tahun 2010 - 2022 didominasi oleh usia produktif (15- 64 tahun). Hal ini berkaitan dengan tingkat rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*). Sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 2.11 (A), rasio tingkat ketergantungan di Kota Probolinggo agaknya lebih baik jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Kondisi ini dapat diartikan bahwa beban penduduk usia produktif relatif kecil untuk menanggung penduduk non-produktif. Masih berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Probolinggo pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa secara rata - rata kualitas SDM Probolinggo relatif lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. IPM sendiri dinilai dari beberapa aspek, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan yang baik, maka SDM di Kota Probolinggo memiliki kemampuan yang baik untuk menunjang percepatan pembangunan industri. Apalagi, jika dikaitkan dengan data *dependency ratio* sebelumnya, maka sebenarnya SDM di Kota Probolinggo sangat bisa difokuskan untuk pembangunan kedepan karena beban tanggungan yang cukup rendah. Kondisi ini dapat dimandatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023
 Gambar 2.12 (A) Rasio Ketergantungan dan (B) Indeks Pembangunan Manusia

Untuk membedah kesiapan SDM dalam industri secara lebih lanjut Gambar 2.13 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpendidikan tinggi. Semakin banyak partisipan angkatan kerja berpendidikan tinggi menunjukkan kesiapan SDM untuk dapat menjadi pendorong industrialisasi yang berbasis teknologi tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.13 TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi

Merujuk pada Gambar 2.12, diketahui bahwa meskipun IPM Kota Probolinggo cukup baik, ketersediaan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi di Kota Probolinggo cukup terbatas. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan untuk Kota Probolinggo, maka pembangunan industri sebaiknya diarahkan pada industri berteknologi rendah hingga menengah. Dengan demikian, diharapkan terbangun industri yang sesuai dengan kesiapan dan karakteristik masyarakat.

Tabel 2.1 Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan BLK Komunitas

No.	Nama Lembaga	Kejuruan
1	LPK Amanah Husada	Asisten Perawat
		Asisten Bidan
		Asisten Kecantikan
		Manajemen Farmasi dan Apoteker
2	LPK Pratama Mulia	Sekretaris
		Baby Sitter
		Perhotelan
		Account Office
3	LPK Melenium Informatika	Komputer
		Bahasa Inggris
4	LPK Le Centre D'Linguistique	Bahasa Inggris
		Tourist Guide
5	LDP Garuda Mitra Sukses	Cooperative Insentif Training
		Master Plant Development Training
		Business Plant Training
		SOP Development Training
		Market Access Training
		Supervisory and Internal Control Management

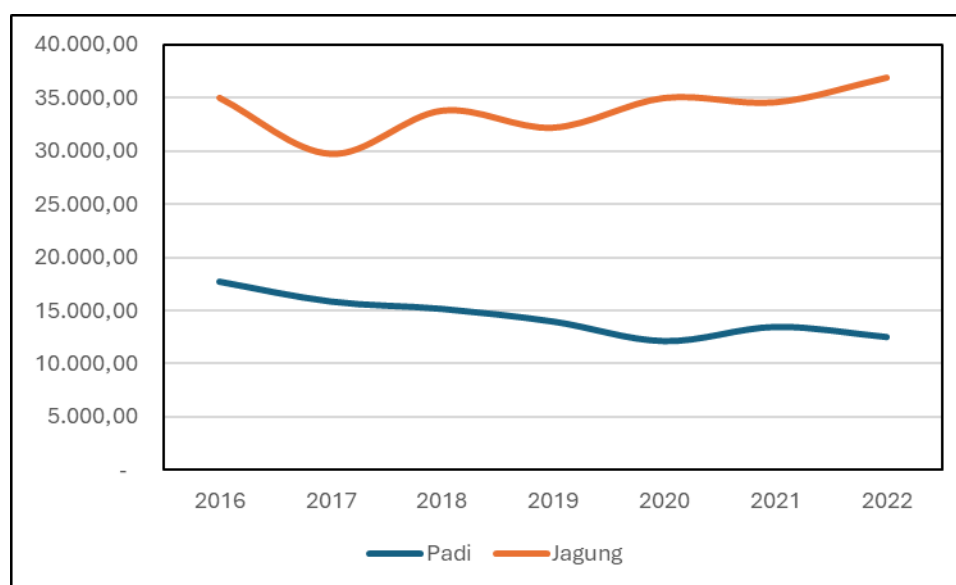
		Perpajakan
		Retail Management Training
		Outbond Training
		Achivement Motivation Training
		SSKNI Training
		Consultant and Accompaniment
6	LPK Weltras Inlastek	Las Busur Listrik
		Las Otogen
		Las Wolfram dengan Gas Pelindung
		Las Metal dengan Gas Pelindung
7	BLK Komunitas PP. Riyadlus Sholihin	Teknik Informatika
8	BLK Komunitas YP. Roudlotut Tholibin	Otomotif Sepeda Motor
9	BLK Komunitas PP. Raudlatul Muta'allimin	
10	UPTD BLK Kota Probolinggo	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diolah (2023)

Selain pendidikan formal tenaga kerja di Kota Probolinggo ini juga ditunjang dengan adanya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Beberapa tempat yang di rinci pada Tabel 2.1 ini dibawah naungan DPMPTSP dan Naker sebagai wadah untuk dapat menambah *softskill* maupun *hardskill* dari tenaga kerja di Kota Probolinggo.

2. Sumber Daya Alam

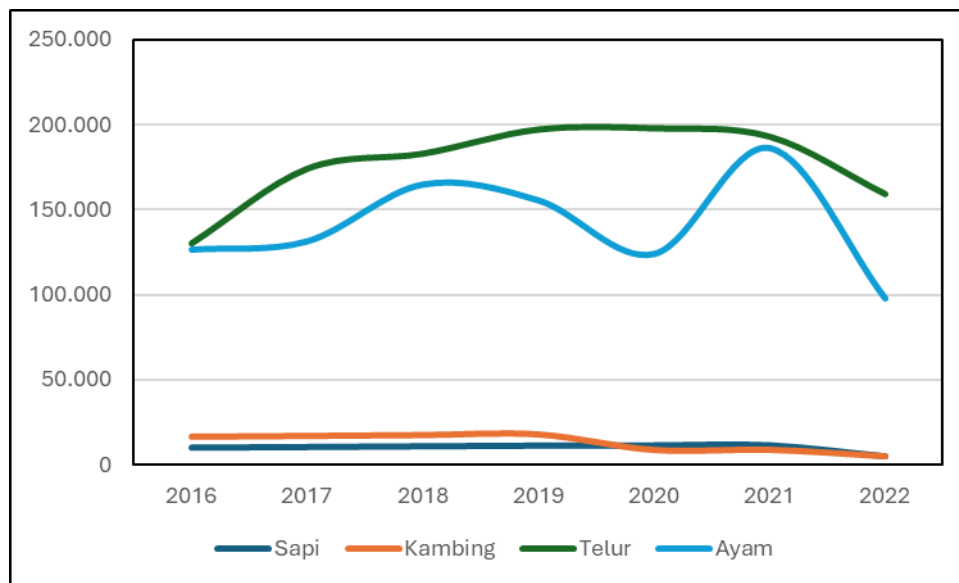
Potensi-potensi sumber daya alam di Kota Probolinggo secara garis besar cukup memadai yang artinya ketersediaan sumberdaya alam mampu mendukung proses industrialisasi Kota Probolinggo. Hal ini didasarkan pada ditetapkannya produk unggulan Kota Probolinggo salah satunya adalah sektor kelompok agro (olahan ikan laut, olahan mangga, olahan jagung, kecap, dan sirup) sebagai produk unggulan daerah pada tahun 2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.14 Jumlah Produksi Tanaman Bahan Makanan (Ton)

Pada gambar 2.14, dapat diketahui bahwa produksi tanaman jagung di Kota Probolinggo lebih besar jika dibandingkan dengan hasil produksi tanaman padi. Potensi ini dapat mendorong pembangunan industri jika dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Untuk mengoptimalkan potensi dari tanaman jagung, salah satunya melalui proses pengolahan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap komoditas jagung. Misalnya, dengan meningkatnya jumlah produksi jagung sebagai bahan baku utama emping jagung, marning jagung dan lepa jagung, tentunya akan mendorong produksi pabrik tersebut.

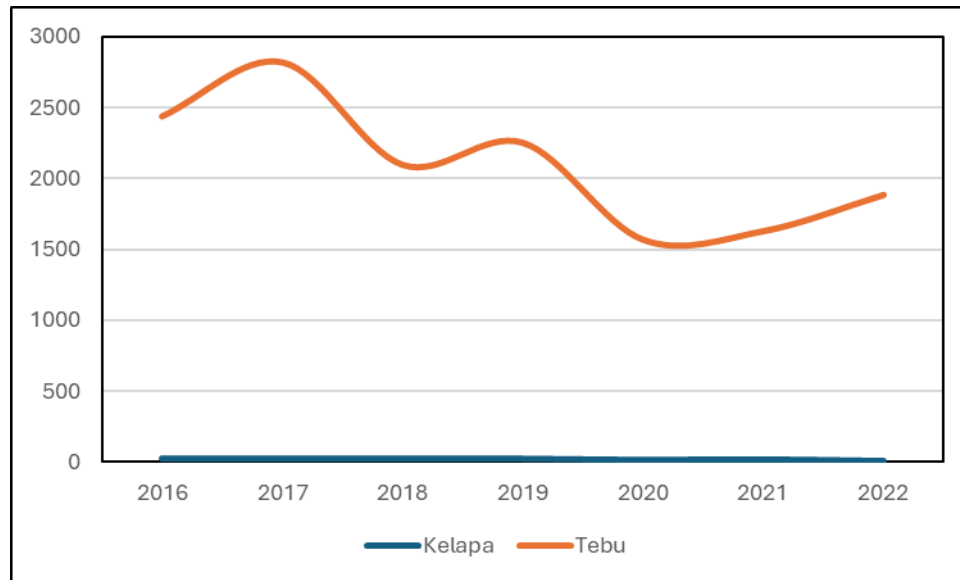


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.15 Produksi Daging Hewan Ternah (Kg)

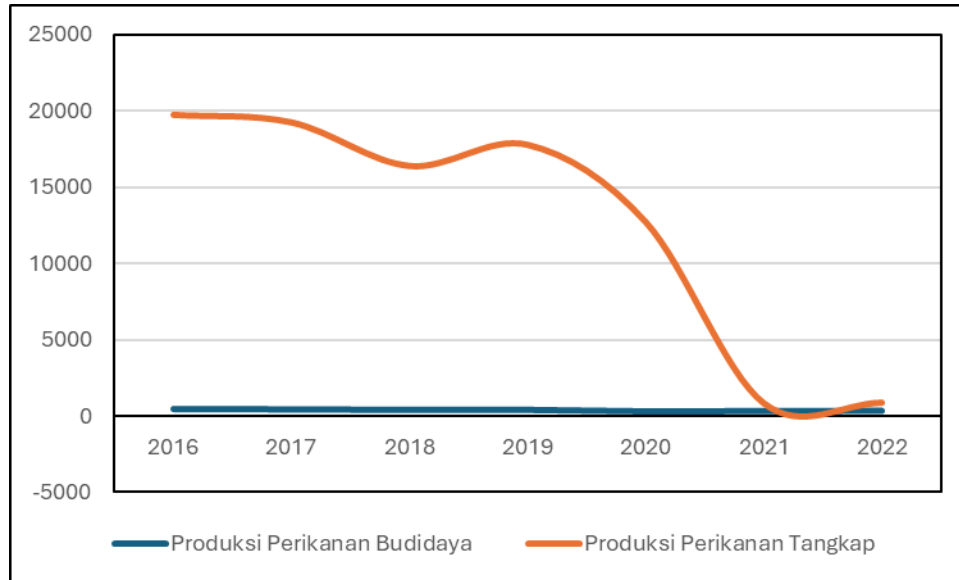
Selanjutnya pada Gambar 2.15 menyajikan data mengenai jumlah produksi daging hewan ternak, khususnya Ayam, Kambing dan Sapi, serta Telur dari tahun 2016 hingga 2022. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa potensi produksi peternakan di Kota Probolinggo cukup tinggi. Dengan adanya peranan indsutri hulu yang mampu mengolah daging hewan ternak secara baik, maka untuk keberlanjutan sumber daya tersebut mampu diolah lebih lanjut dengan adanya industri makanan untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Poin penting dengan adanya peningkatan produktivitas daging hewan ternak adalah perlunya peranan industri yang mampu mengolah secara baik agar pertumbuhan sumber daya daging dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Lebih spesifik, potensi peternakan yang dapat mendorong perekonomian di Kota Probolinggo adalah produksi daging kambing dan sapi. Hal tersebut, dilihat dari tingginya produksi sapi dan kambing jika dibandingkan dengan produksi lainnya.

Potensi sumber daya alam lainnya di Kota Probolinggo adalah sektor perkebunan. Gambar 2.16 menyajikan data jumlah produksi perkebunan dalam satuan ton, pada tahun 2016 hingga 2022. Terdapat dua komoditi utama dalam perkebunan Kota Probolinggo, yaitu: (i) tebu dan (ii) kelapa. Berdasarkan gambaran tersebut, produksi tebu di Probolinggo sangat besar. Hal tersebut, tentunya dapat mendorong industri pengolahan tebu, misalnya produksi gula di Probolinggo.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023
 Gambar 2.16 Produksi Perkebunan (Kg)

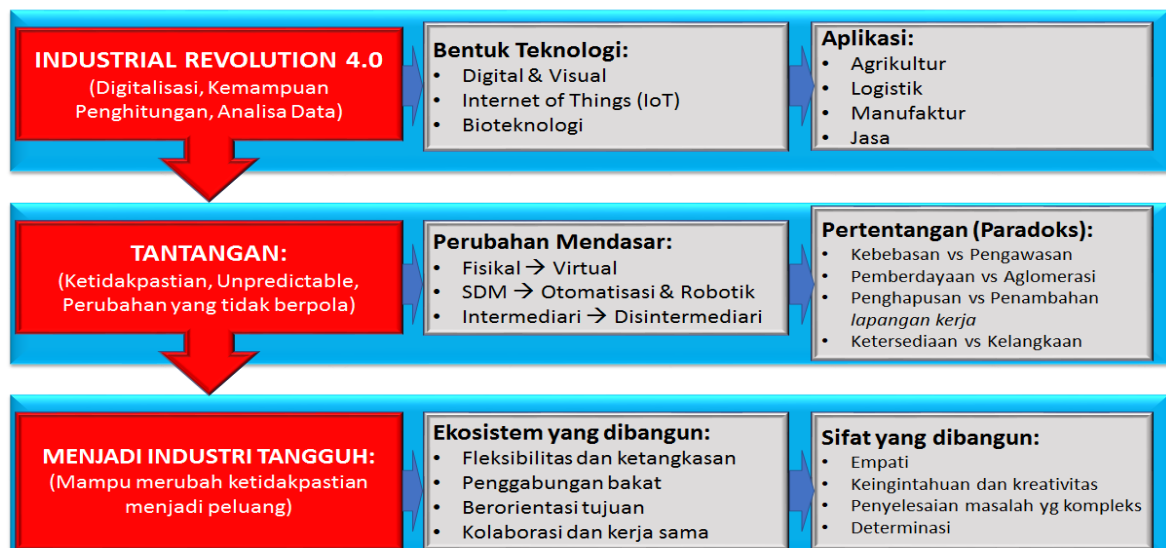
Selanjutnya melihat potensi perikanan di Kota Probolinggo. Pada Gambar 2.17 menyajikan data jumlah produksi perikanan dalam satuan ton, pada tahun 2016 hingga 2022. Terdapat dua komoditi utama dalam perikanan Kota Probolinggo, yaitu: (i) perikanan budidaya dan (ii) perikanan tangkap. Hal ini didukung oleh besarnya hasil produksi perikanan tahun 2016 hingga 2019 memiliki trend meningkat di tahun akhir jika dibandingkan pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Untuk meningkatkan serta mengembangkan sektor perikanan di Kota Probolinggo, maka dibutuhkan upaya penerapan sistem bisnis yang berbasis hulu ke hilir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023
 Gambar 2.17 Produksi Perikanan (Ton)

3. Teknologi

Penggunaan teknologi didalam sektor industri merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya saing sektor industri. Dengan kata lain, tanpa adanya implementasi teknologi yang baik dalam sektor industri, maka perkembangan industri di suatu daerah dapat menjadi semakin tertinggal. Keberadaan revolusi industri 4.0 merupakan tantangan dan juga kesempatan untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah industri yang tangguh. Pada umumnya, revolusi industri memiliki ciri-ciri keterlibatan digitalisasi didalamnya. Dalam era keterbukaan ekonomi global, gelombang revolusi industri 4.0 ini tidak mungkin dihindari. Sehingga, pembangunan industri yang berkarakteristik digital tidak bisa diabaikan, jika Kota Probolinggo mengharapkan adanya pembangunan industri Kota Probolinggo yang tangguh. Gambar 2.18 menggambarkan implikasi revolusi industri 4.0 terhadap pembangunan industri.



Sumber: Pratikno (2018)
 Gambar 2.18 Industrialisasi Pada Era Revolusi Industri 4.0

Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) usaha yang tinggi dan ketidakteraturan perubahan iklim usaha sulit diprediksi (*unpredictable*). Artinya, ekosistem industrialisasi menuntut adanya pengelolaan industri yang fleksibel, khususnya pada aspek regulasi. Sehingga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang lebih mutakhir (*advance*) sangat dibutuhkan, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Pada era revolusi industri 4.0, pembangunan industri bersifat multi dimensi, sehingga diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang bersifat holistik. Untuk itu, peningkatan penguasaan teknologi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan industri. Berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Probolinggo, salah satu isu terkait hal ini adalah masih rendahnya penguasaan teknologi khususnya bagi IKM. Dengan demikian, pembangunan industri ke depan juga harus diarahkan pada peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi mutakhir, baik untuk industri besar, menengah, maupun IKM.

Spesifik pada Probolinggo, perkembangan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup pesat. Probolinggo telah memiliki wadah yang berfokus pada pengembangan informasi dan teknologi. Diharapkan dengan adanya wadah tersebut mampu berkontribusi terhadap masyarakat dan membantu mempromosikan IKM di Kota Probolinggo.

4. Inovasi dan Kreativitas

Pada dasarnya, ketika tingkat persaingan semakin meningkat, ide, kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai. Memiliki keunggulan komparatif saja tidak cukup untuk memasuki pasar dengan persaingan yang semakin ketat, diperlukan keunggulan kompetitif dimana sangat dipengaruhi oleh inovasi dan kreativitas.

Inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mendiversifikasi produk, karena pasar cenderung semakin spesifik (bukan massal). Perilaku harga produk yang bersifat unik/spesifik adalah "*price maker*" sehingga diharapkan memiliki kemampuan bersaing di pasar global. Lebih dari itu, produk dan jasa kreatif pada umumnya bersifat unik/spesifik. Sehingga, produk dan jasa kreatif diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu mengimbangi semakin beragamnya produk impor yang masuk akibat perdagangan bebas.

Berdasarkan gambaran tersebut, pengembangan industri berbasis inovasi dan kreativitas yang biasa disebut industri perintis (*start up*) menjadi penting untuk dikembangkan kedepan. Diharapkan, adanya industri ini dapat mendorong tumbuhnya industri lainnya.

Sementara itu, dalam rangka mendorong tumbuhnya industri, pemerintah Probolinggo telah melakukan kegiatan promosi sektor industri yang cukup masif. Diharapkan, kegiatan promosi tersebut dapat memperkenalkan produk industri Probolinggo, khususnya IKM, ke khalayak umum. Sehingga, pada gilirannya mampu menarik minat investasi di Probolinggo. Kegiatan promosi yang dimaksud dilakukan melalui media elektronik atau media offline seperti pameran dan gelar seni budaya.

5. Pembiayaan

Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Probolinggo adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (*Public Private Partnership*) maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Disamping pembiayaan melalui kredit perbankan, alternatif penggunaan *municipal bond*, *corporate bond*, serta instrumen keuangan syariah seperti optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur. Beberapa skema program pembiayaan juga diakomodir oleh dana bergulir yang bersumber dari APBD pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Selain itu juga bersumber dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank negara maupun swasta terlebih untuk pembiayaan IKM.

Sementara itu, berdasarkan data BPS Kota Probolinggo, kredit yang telah disalurkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa dukungan bagi pelaku industri di Probolinggo sebenarnya sudah cukup baik dan dirasa mampu mendukung pengembangan industri.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disajikan sebelumnya, diketahui bahwa peluang pengembangan industri di Kota Probolinggo masih cukup besar. Dimana, ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia cukup berlimpah dan mampu mendukung proses industrialisasi Probolinggo. Namun demikian, poin penting dalam hal ini adalah percepatan pembangunan industri berbasis keunggulan lokal. Sehingga, pesatnya pertumbuhan industri diharapkan juga dapat mendorong pengembangan daerah sekitar.

Kendatipun demikian, potensi sumberdaya ini dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu: (i) peningkatan peran industri dalam perekonomian; (ii) percepatan pertumbuhan industri; (iii) peningkatan penyediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi; dan (iv) percepatan peningkatan investasi di sektor industri.

C. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan infrastruktur merupakan syarat penting dalam menunjang percepatan pertumbuhan sektor industri. Ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi Probolinggo telah sedemikian rupa diatur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud meliputi transportasi dan energi.

Pertama adalah transportasi, jaringan telekomunikasi, ketersediaan air, dan standarisasi industri, yang berguna untuk menunjang konektivitas dan menjaga ketersediaan dalam memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Semakin baik transportasi di suatu daerah, maka akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri di daerah tersebut, salah satunya berupa penurunan biaya produksi.

a. Pelabuhan

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo didukung pula dengan pembenahan infrastruktur sarana transportasi laut yang ada di Kota Probolinggo, seperti Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang merupakan ujung tombak fasilitas transportasi laut di Kota Probolinggo. Pelabuhan Tanjung Tembaga sebagai akses kelautan dan merupakan pelabuhan besar berskala nasional yang baru saja diresmikan oleh Menteri Perhubungan. Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan jasa kapal bagi wilayah Probolinggo. Pembangunan pelabuhan ini menunjang proses pengembangan industri di Probolinggo. Segala bentuk fasilitas eksisting dan seluruh fasilitas yang sedang dikembangkan di pelabuhan tersebut mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Proses realisasi pembangunan proyek ini dituangkan dalam tiga tahap, meliputi jangka pendek yaitu sekitar tahun 2013-2017, jangka menengah yaitu sekitar tahun 2018-2022, dan jangka panjang yaitu sekitar tahun 2023-2033. Adapun data eksisting UPT pelabuhan yang beroperasi di Kota Probolinggo dapat terangkum di Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Data Eksisting Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Bawah Pengawasan

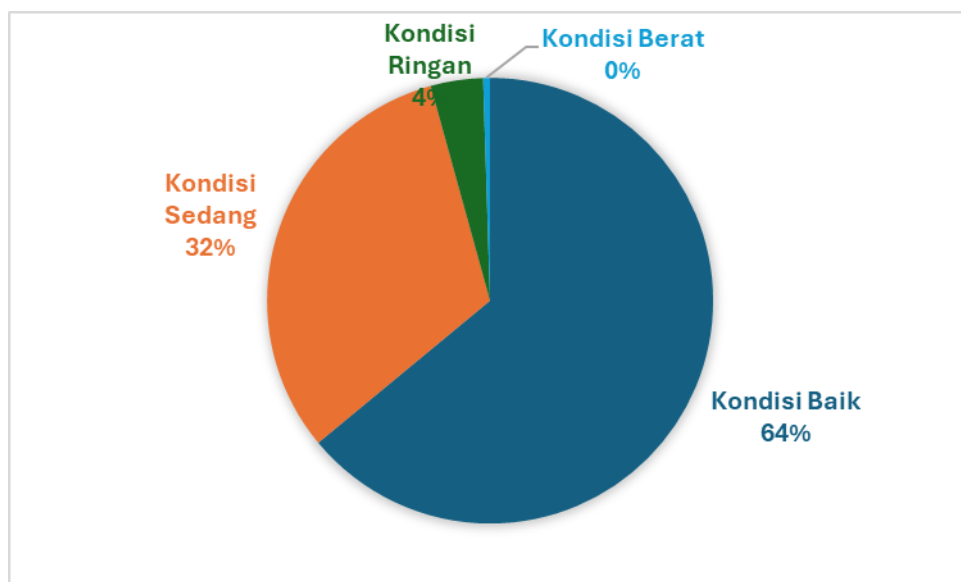
No.	Nama UPT	Nama Pelabuhan	Lokasi STS	Berizin	Ket.
1	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Pelindo III Cabang Probolinggo (BUP)	Kota Probolinggo	KP 88 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011	BUP

2	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (BUP)	Kota Probolinggo	KP 1009 Tahun 2011 Tanggal 21 Desember 2011	BUP
3	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Pamolit Adhesive Industri (TUKS)	Kota Probolinggo	No: BX-271/PP 008 tanggal 30 Juli 2015	TUKS
4	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Wira Sentoso Abadi (TUKS)	Kota Probolinggo	No: BX-371/PP 008 Tanggal 30 Juli 2015	TUKS
5	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Kutai Timber Indonesia (TUKS)	Kota Probolinggo	No: BX-170/PP 008 Tanggal 5 April 2015	TUKS
6	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Karya Utama Sejahtera (TUKS)	Kota Probolinggo	No: BX-662/PP 008 Tanggal 21 Desember 2015	TUKS

Sumber: Direktori Jenderal Perhubungan Laut, Kelas IV Probolinggo diolah (2023)

b. Akses Jalan

Selain infrastruktur industri berupa pelabuhan, terdapat jalan biasa dan jalan tol yang menjadi sarana prasarana penunjang pengembangan industri. Pembangunan ruas jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dari Probolinggo – Banyuwangi dengan menerapkan model elevated. Jalan tol Probolinggo – Banyuwangi direncanakan akan memiliki lima ruas yang akan terhubung ke wilayah Ketapang. Pembangunan jalan tol ini berada dalam pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



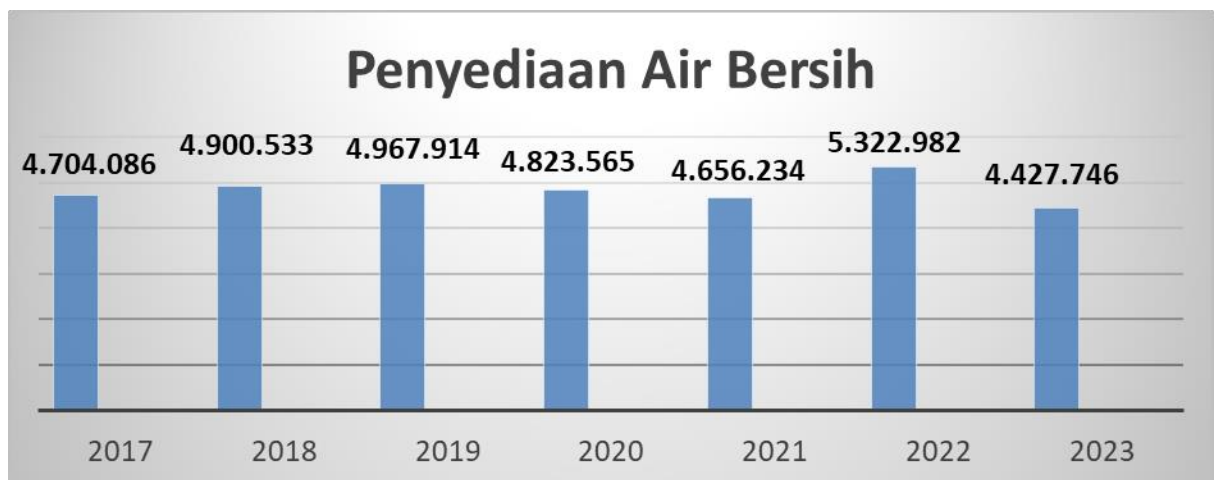
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.19 Kondisi Jalan Kota Probolinggo

Sejak tahun 2020, pemerintah Kota Probolinggo telah memfokuskan pembangunan khususnya pada pembenahan kualitas jalan yang menjadi aksesibilitas masyarakat. Panjang jalan di Kota Probolinggo adalah 218.135 kilometer. Berdasarkan gambar di atas, beberapa kecamatan membutuhkan perbaikan jalan, baik dari segi peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan secara berkala, hingga pada tahap pemeliharaan secara rutin.

c. Ketersediaan Air

Fasilitas Ketersediaan air di Kota Probolinggo dinaungi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Bayuangga yang menyediakan dan memproduksi kapasitas air bersih untuk mendukung kehidupan manusia. Gambar 2.20 menunjukkan volume air bersih dari perusahaan air bersih yang disalurkan kepada pelanggan. Sejak 2022 hingga 2023 mengalami penurunan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kualitas dan kuantitas air di Kota Probolinggo.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.20 Air yang disalurkan (m³)

Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat, Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Kegiatan Mandi/Cuci dan lainnya oleh Rumah Tangga di Kota Probolinggo didominasi oleh Sumur bor/Pompa sebesar 71,83%. Kemudian Leding 22,98% dan Sumur/ Mata air terlindung sebesar 5,05%. Sumber air tersebut termasuk dalam kriteria layak. Walaupun demikian penggunaan Sumber air Leding dapat lebih ditingkatkan. Kota Probolinggo memiliki 17 sumber mata air yang tersebar di semua kecamatan. Selain menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitar, sumber mata air di Kota Probolinggo telah dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Tabel 2.3 Data Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

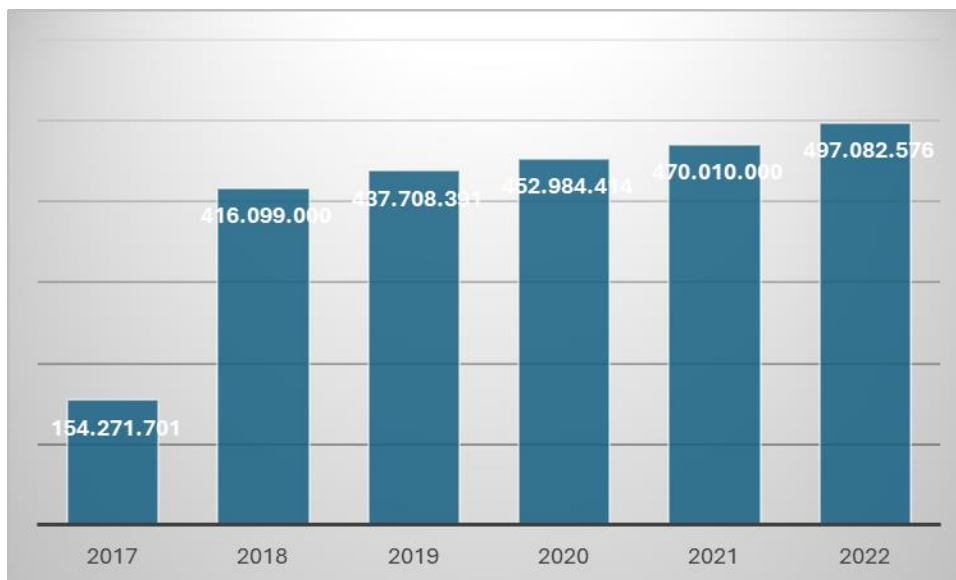
NO	NAMA SUMBER MATA AIR	LOKASI/TEMPAT
1	Langse	Jl. Merbabu Kel. Triwung Lor, Kec. Kademangan
2	Jalil	Jl. Soekarno Hatta Kel. Ketapang Kec. Kademangan
3	Genthong	Jl. Raya Panglima Sudirman Kel. Pilang Kec. Kademangan
4	Tiban	Jl. Soekarno Hatta Kel. Pilang Kec. Kademangan
5	Pilang Renes	Jl. Soekarno - Hatta No.124, Kel. Pilang, Kec. Kademangan
6	Umbul/Ganesha	Jl. Soekarno Hatta Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran
7	Sumber Pacar	Jl. Arief Rahman Hakim No.35 RT.3/RW.1 Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran
8	Sumber Kekok	Jl. Arief Rahman Hakim Gang Kemuning RT.4/ RW.1 Tisnonegaran Kec. Kanigaran
9	Arum	TPU Mangunharjo Jl. Yos Sudarso, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan
10	Jati	Kel. Sukoharjo, Kec. Kanigaran
11	Sumber Taman	Jl. Sunan Giri Gang Krajan RT.01/ RW.01 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih
12	Sumber Ardi	Jl. Prof. Dr. Hamka, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih
13	Senthong	Kel. Jrebeng Wetan dan Kel. Jrebeng Kidul Kec. Kedopok
14	Grinting/Sumber Wetan	Jl. Nanas RT. 4/ RW. 2 Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok
15	Sumber Curah Grinting	Jl Porong Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok
16	Sumber Gayam	Jl. Soekarno Hatta Gang Gayam Kel. Pilang, Kec. Kademangan
17	Sumber Pilang	Jl. Soekarno Hatta Gang Gayam Kel. Pilang Kec. Kademangan

Sumber: Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Sumber Mata Air Di Wilayah Kota Probolinggo sebagai Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah

d. Listrik

Listrik merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan sehari-hari, terutama industri sangat mengandalkan listrik dalam kegiatan operasional. Sehingga ketersediaan listrik membawa pengaruh positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Probolinggo. Jumlah listrik yang terjual di Kota Probolinggo

selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Probolinggo yang menikmati akses listrik semakin meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.21 Jumlah Listrik Terjual (Juta KWh)

e. Telekomunikasi

Pemerintah Kota Probolinggo secara efektif melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan dalam bidang telekomunikasi dan informasi. Komunikasi masyarakat di Kota Probolinggo menjadi mudah dikarenakan didukung dengan layanan internet, yang berbasis via satelit. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) dengan pihak Telkom Pasuruan, untuk bersinergi untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas internet pada wilayah yang belum terjangkau jaringan internet, dengan memasang jaringan layanan internet media satelit dengan teknologi VSAT IP atau internet *broadbone*. Tujuannya yaitu agar seluruh masyarakat di Kota Probolinggo dapat dengan mudah berkomunikasi.

f. Sanitasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyimpulkan bahwa sanitasi di Kota Probolinggo dapat dikatakan sangat layak. Saat ini akses air minum dan sanitasi masyarakat Kota Probolinggo telah mencapai sekitar 99,15%, dimana capaian sebelumnya Kota Probolinggo berada di bawah nilai rata-rata pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu indikatornya ialah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akses air minum, sanitasi dan perubahan perilaku yang menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Adapun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal dimanfaatkan guna pengelolaan limbah cair di permukiman padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi. IPAL di Kota Probolinggo sudah mencakup seluruh kecamatan. Pada Tabel 2.4 menunjukkan rincian sarana IPAL di setiap kecamatan dengan kapasitas yang dapat di tampung pada setiap jenis sarana.

Tabel 2.4 Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kota Probolinggo

No	KECAMATAN	JENIS SARANA	TAHUN ANGGARAN	KAPASITAS (KK)
1	Kanigaran	Tisnonegaran (DAU)	2019	80
2		Curah Grinting (DAK)	2021	80
3		Sukoharjo (DAK)	2014	150
4	Wonoasih	Sumber Taman (USRI)	2014	150
5		Kedungasem (USRI)	2013	150
6		Kedungasem (USRI)	2014	150
7		Sumber Taman (DAK) 1	2014	150
8		Sumber Taman (DAK) 2	2012	150
9		Kedung Galeng (USRI)	2013	150
10		Kedung Galeng (DAK)	2014	70
11		Kedunggaleng (DAK)	2017	130
12		Sumber Taman (DAK)	2017	70
13		Pakis Taji (APBN)	2017	70
14		Kedungasem (DAU)	2018	70
15		Kedunggaleng (DAU)	2018	160
16		Jrebeng Kidul (DAU)	2019	80
17		Pakis Taji (DAK)	2014	150
18		Sumber Taman (DAK) 3	2019	80
19		Kedung galeng (DAK)	2019	80
20		Jrebeng Kidul (DAK)	2022	60
21		Pakistaji (DAK)	2022	60
22		Wonoasih (DAK)	2021	80
23		Jrebeng Kidul (DAK)	2021	80
24	Kedupok	Jrebeng Wetang (USRI) 1	2014	150
25		Kareng Lor (DAU)	2018	80
26		Jrebeng Kulon (DAK)	2018	80

27		Jrebeng Lor (DAK)	2018	80	
28		Sumber Wetan (DAK)	2018	80	
29		Kedopok (DAK)	2019	80	
30		Jrebeng Wetang (USRI) 2	2014	150	
31		Jrebeng Lor (DAK)	2022	60	
32		Kareng Lor (DAK)	2019	80	
33		Kareng Lor (USRI) 1	2013	150	
34	Kademangan	Triwung Kidul (USRI)	2013	150	
35		Kademangan	2022	60	
36		Kademangan (USRI)	2014	150	
37		Kademangan (DAK)	2017	70	
38		Pilang (DAK)	2017	80	
39		Triwungan Kidul (DAK)	2018	80	
40		Triwung Lor (DAK)	2018	80	
41		Pilang (DAK)	2019	80	
42		Pilang 1 (DAK)	2014	100	
43		Kademangan (DAK)	2019	80	
44		Pilang 2 (DAK)	2012	100	
45		Mayangan	Mayangan (USRI)	2011	150
46		Mayangan	Jati 1 (USRI)	2012	150
47	Jati 2 (USRI)		2012	150	
48	Wiroborang (DAK)		2022	60	
49	Jati (DAK)		2017	80	
Total				4.900	

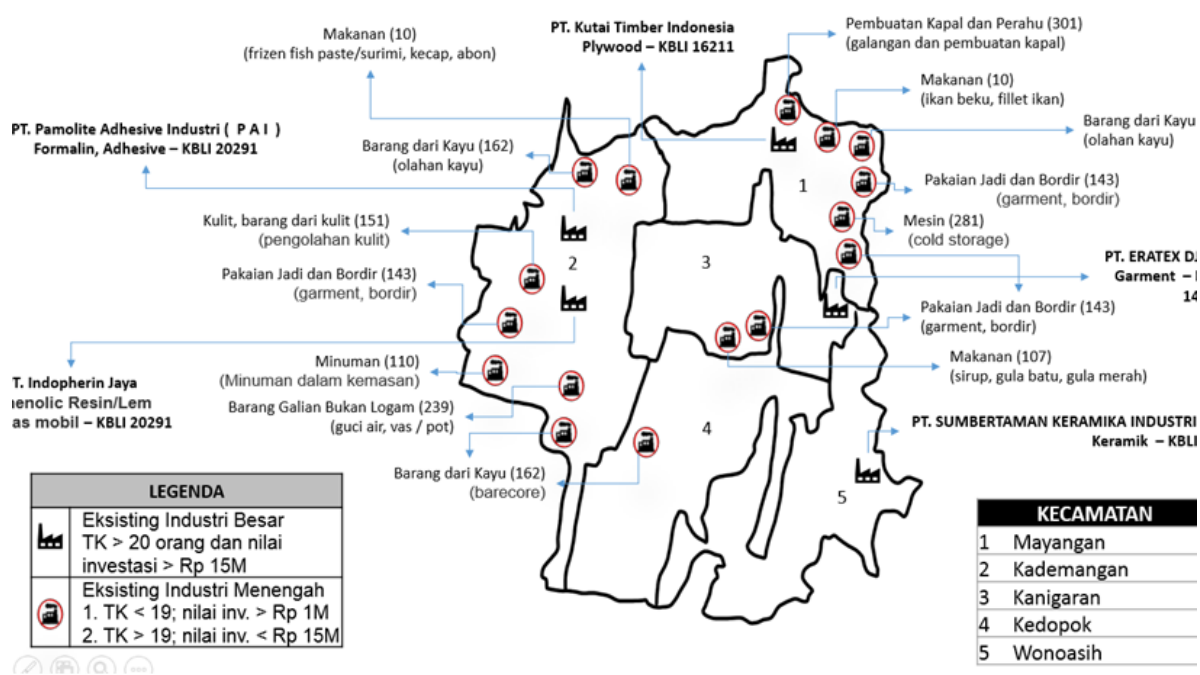
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo, 2024.

Selain sarana prasarana penunjang, Kota Probolinggo standarisasi dan sertifikasi produk industri juga tersedia guna meningkatkan mutu dan daya saing produk. Ada beberapa jenis standarisasi yang dinaungi oleh OPD terkait. Seperti SPP_PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), legalitas usaha, merk dagang, sertifikasi halal, barcode, SNI-ISO (Standar Nasional Indonesia).

Kedua adalah sarana dan prasarana energi. Selain transportasi, sarana dan prasarana energi merupakan komponen vital bagi pembangunan industri. Untuk itu, Probolinggo telah menyiapkan pengembangan sistem jaringan energi untuk menunjang industrialisasi.

Lebih lanjut, perencanaan yang harmonis antara pengembangan transportasi dan energi sangat dibutuhkan. Selain dibutuhkan untuk mendukung industrialisasi, hal tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kota Probolinggo. Sehingga, sinkronisasi pembangunan antar sektor industri dengan sarana dan prasarana menjadi tantangan kedepan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Kota Probolinggo.

Mengacu pada data DKUPP, Kota Probolinggo membagi dua industri berdasarkan skalanya. Secara rinci, terdapat 5 industri skala besar dan 15 industri skala sedang yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Probolinggo sesuai yang ditunjukkan pada Gambar 2.22.



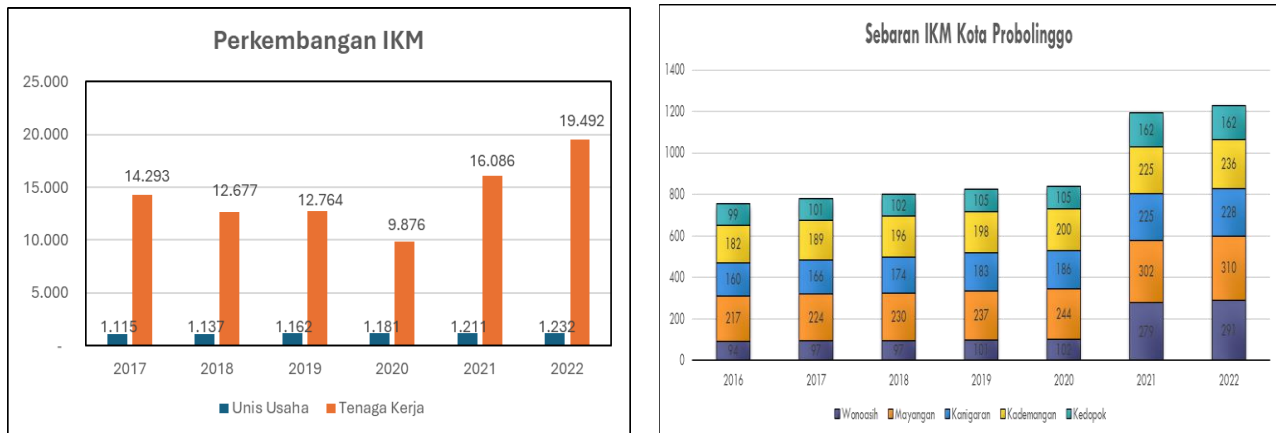
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2023
Gambar 2.22 Sebaran Industri Besar – Menengah di Kota Probolinggo

Meskipun demikian, potensi sumberdaya ini dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu: (i) optimalisasi penataan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri; (ii) peningkatan sinkronisasi dengan lahan pemukiman; dan (iii) peningkatan pengelolaan limbah, sanitasi, dan sampah. Artinya, pembangunan sektor industri Kota Probolinggo diharapkan tidak memunculkan permasalahan pemanfaatan lahan serta pencemaran lingkungan. Sehingga, pembangunan industri harus memperhitungkan kawasan – kawasan tertentu guna terciptanya *green industry*.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Kota Probolinggo terus berupaya meningkatkan sumbangsih sektor industri pada perekonomian, terutama peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Sentra IKM. Pasa dasarnya, IKM Kota Probolinggo tersebar pada setiap kecamatan. Artinya,

IKM menjadi komponen krusial di dalam perekonomian Probolinggo karena eksistensinya terus meningkat. Dilain sisi, IKM Kota Probolinggo memiliki daya serap tenaga kerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa, IKM di Kota Probolinggo semakin meningkat. Gambar 2.23 menunjukkan perkembangan IKM dan sebarannya di Kota Probolinggo.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2023

Gambar 2.23 (A) Perkembangan IKM dan (B) Sebaran IKM di Kota Probolinggo

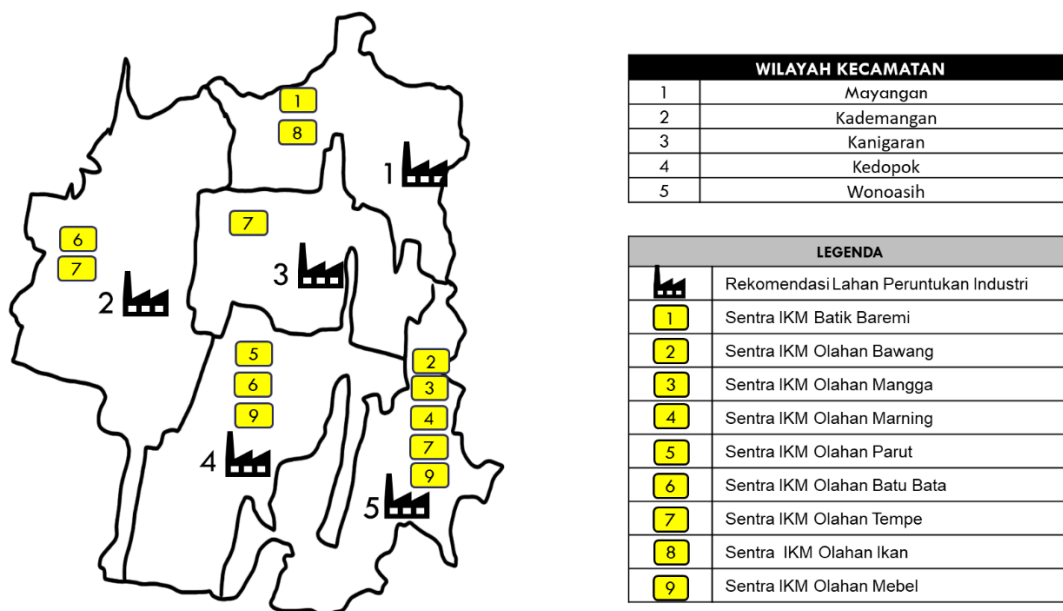
Merujuk pada Gambar 2.23, dapat ditarik kesimpulan bahwa dua komponen yakni IKM dan tenaga kerja IKM meningkat tajam selama lima tahun terakhir. Artinya, IKM Kota Probolinggo memiliki potensi untuk terus berkembang. Dimana, semuanya IKM tersebar di Kota Probolinggo, dengan Kecamatan Mayangan memiliki IKM paling banyak diantara kecamatan lainnya di Kota Probolinggo sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Data Industri Kecil Non – Sentra Industri

Tahun	Wonoasih	Mayangan	Kanigaran	Kademangan	Kedopok	Total
2016	94	217	160	182	99	752
2017	97	224	166	189	101	777
2018	97	230	174	196	102	799
2019	101	237	183	198	105	824
2020	102	244	186	200	105	837
2021	279	302	225	225	162	1193
2022	291	310	228	236	162	1227

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2023

Banyaknya industri kecil menengah yang berkembang di Kota Probolinggo pada saat ini menunjukkan perkembangan pesat Sentra IKM yang ada. Sebanyak 12 sentra dan potensi sentra IKM yang diperinci pada Tabel 2.6 beserta sebaran yang ditunjukkan melalui Gambar 2.24. Adapun pada komoditi batik terdapat Kampung Baremi Wisata Batik terletak di Kecamatan Mayangan yang saat ini telah berkembang menjadi Sentra Industri.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2023

Gambar 2.24 Sebaran Sentra IKM di Kota Probolinggo

Dalam hal ini, mengacu pada RIPIN, pengertian sentra IKM adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Tabel 2.6 Data Sentra dan Potensi Sentra Industri

NO	JENIS SENTRA	LOKASI	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Batik Baremi	Mayangan	62.000.000	11	21
2	Bawang	Wonoasih	21.000.000	7	7
3	Mangga	Wonoasih	10.000.000	10	26
4	Marning	Wonoasih	17.000.000	17	17
5	Parut	Kedopok	10.000.000	10	10
6	Batu Bata Pohsangit Kidul	Kademangan	31.000.000	13	68
7	Batu Bata Sumberwetan	Kedopok	89.500.000	45	260
8	Tempe Curahgrinting	Kanigaran	114.000.000	20	78
9	Tempe Sumbertaman	Wonoasih	695.000.000	139	139
10	Olahan Ikan	Mayangan	66.000.000	22	49
11	Tempe Pohsangit Kidul	Kademangan	25.000.000	5	10
12	Mebel	Wonoasih		7	7

		210.000.000	
Total		1.350.500.000	316 702

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kota Probolinggo, 2023

Adapun varian produk batik antara lain: kain, kaos, masker, baju dan selendang. Saat ini Kampung Batik Baremi telah berkembang menjadi Sentra Industri di Kota Probolinggo. Tabel 2.7 menunjukkan Data Potensi Sentra IKM Kampung Batik Baremi di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Tabel 2.7 Data Potensi Sentra IKM Kampung Batik Baremi

No	Nama IKM	Tenaga Kerja	Nilai Investasi Mesin/Peralatan	Nilai Produksi per Tahun	Nilai Omzet / Penjualan	Nilai Bahan Baku
1	Batik Baremi	2	50,000,000	21,000,000	30,000,000	10,000,000
2	Azrya Batik	2	2,000,000	5,000,000	7,500,000	4,000,000
3	Rumah Batik Rafano Batik 2	2	1,000,000	4,800,000	7,200,000	3,000,000
4	Rumah Batik Radin	2	1,000,000	6,000,000	9,000,000	3,000,000
5	Risqi Putra Batik	2	1,000,000	4,800,000	7,200,000	3,000,000
6	Omah Batik Sekar Laut	2	2,000,000	5,000,000	7,500,000	4,000,000
7	Rumah Batik Shayana	2	1,000,000	4,800,000	7,200,000	3,000,000
8	Griya Batik Dwi Putra	2	1,000,000	6,500,000	9,500,000	3,000,000
9	Rumah Batik Pantura	2	1,000,000	4,800,000	7,200,000	3,000,000
10	Ciendira	2	1,000,000	6,000,000	9,000,000	3,000,000
11	Batik Seduluran	1	1,000,000	1,500,000	2,000,000	500,000
12	Batik Putri Bremit	1	1,000,000	1,500,000	2,000,000	500,000
13	Batik Sekar Anom	2	2,000,000	5,000,000	7,500,000	4,000,000
14	Batik Angga	2	1,000,000	4,800,000	7,200,000	3,000,000

No	Nama IKM	Tenaga Kerja	Nilai Investasi Mesin/Peralatan	Nilai Produksi per Tahun	Nilai Omzet / Penjualan	Nilai Bahan Baku
15	Batik Xoteen	2	1,000,000	1,200,000	1,800,000	900,000
16	Rumah Batik Daniar	2	1,000,000	1,200,000	1,800,000	900,000
17	Rumah Batik Elok	2	1,000,000	1,200,000	1,800,000	900,000
18	Rumah Batik Mustofa	2	1,000,000	1,250,000	1,800,000	900,000
19	Admonadi	2	1,000,000	1,200,000	1,800,000	900,000
20	Batik Mawar Biru	2	1,500,000	2,400,000	3,600,000	1,200,000
21	Visha Batik	2	1,000,000	840,000	1,800,000	960,000
JUMLAH		40	73,500,000	90,790,000	134,400,000	53,660,000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2023

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa sentra IKM Probolinggo memiliki potensi untuk terus tumbuh dan eksis. Namun demikian, isu pembangunan sentra IKM kedepan adalah mendorong minat investasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu juga diselenggarakan even promosi guna meningkatkan pemasaran. Adapun dalam pemasaran dan upaya promosi juga dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dan IT. Contohnya adanya *website* umikhebat.probolinggokota.go.id dan instagram dengan id: *dekransdakotaprobolinggo*. Penggunaan *e-commers* selain membantu IKM untuk promosi juga memudahkan konsumen untuk dapat berbelanja online walaupun tidak berada di Kota Probolinggo. Semakin membaiknya kedua komponen tersebut, maka diharapkan daya saing sentra IKM akan menjadi semakin tinggi.

Tabel 2.8 Daftar Even Promosi Ikm Kota Probolinggo

No	Even	Lokasi	Keterangan
1	Hari Jadi Kota Probolinggo	Kota Probolinggo	Merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi kota probolinggo yang meliputi gelar produk ikm/ukm; pertunjukan seni dan hiburan, dan sebagainya
2	Bazar Ramadhan	Kota Probolinggo	Kegiatan gelar produk ikm / ukm yang diadakan setiap bulan ramadhan

3	Pasar Tugu	Kota Probolinggo	Kegiatan gelar produk ikm / ukm setiap hari sabtu dan minggu
4	Gelar Produk Umik Hebat	Kota Probolinggo	Kegiatan gelar produk ikm / ukm tahunan
5	Peringatan Hari Batik	Kota Probolinggo	Kegiatan gelar produk, fashion batik, dan sebagainya
6.	Event SEMIPRO (Seminggu di Kota Probolinggo)	Kota Probolinggo	Kegiatan Seni dan Budaya beserta Gelar Produk IKM/UMKM.
7.	Pameran / Gelar Produk Di Even Regional Maupun Nasional	Regional Dan Nasional	Mengikuti kegiatan gelar produk IKM / UKM di setiap even yang diselenggarakan di tingkat regional maupun nasional

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kota Probolinggo, 2023

Tidak hanya berfokus pada industri kecil. Adapun data eksisting industri menengah dan besar yang beroperasi di Kota Probolinggo, sebagaimana yang diperinci pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Data Industri Menengah dan Besar

No.	NAMA PERUSAHAAN	KECAMATAN	NAMA PRODUK	JENIS	TENAGA KERJA	KETERANGAN
1	AKAS	KANIGARAN	BERAS	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
2	ASRI	WONOASIH	TAHU KEDELAI	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
3	CV. IE IE	KANIGARAN	GULA BATU	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
4	ISYAM JAYA	KADEMANGAN	KERUPUK RAMBAK	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
5	KERUPUK SALEH	WONOASIH	KERUPUK RANTAI	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
6	PANCARAN KASIH	MAYANGAN	KERUPUK IKAN TENGIRI	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
7	CV. PROMA TUN SAROYYAN	WONOASIH	TAHU KEDELAI	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
8	RUKUN JAYA	KADEMANGAN	KERUPUK	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
9	SARI BUMI	MAYANGAN	TAHU PUTIH	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
10	SULUNG SUMBER REJEKI	MAYANGAN	TAHU KEDELAI	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
11	AVILAND RIVA RANCH	KADEMANGAN	MINUMAN	MAMIN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
12	ANUGERAH SEJATI	KADEMANGAN	JASA JAHIT	TEKSTIL DAN	20-99	INDUSTRI

	JAYA		SPREI	PAKAIAN JADI	Org	MENENGAH
13	PANCA JAYA GARMENT	KANIGARAN	CELANA JEANS	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
14	SANDANG JAYA MAS	KADEMANGAN	SEPRAI	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
15	SUGITAN	KANIGARAN	BATIK	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
16	ARTA BUSANA	KANIGARAN	CELANA	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
17	BATIK TENGGERAN	KANIGARAN	Garment Atau Pakaian Jadi dari	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
18	GALANG HARKAT BUSANA	KANIGARAN	Pakaian Jadi	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
19	JAYA MANDIRI GARMEN	KADEMANGAN	Jasa Jahit Celana	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
20	CV. KINGQWEEN	KADEMANGAN	Baju Kemeja	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
21	PHILIP JAYA	KEDOPOK	Pakaian	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
22	PT. TJIWULAN PUTRA MANDIRI	KADEMANGAN	GAMIS	TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
23	CV. BATU JAJAR	KADEMANGAN	Barecore	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU, DAN ANYAMAN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
24.	CV. JAWA WOOD	MAYANGAN	Panel Kayu	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU, DAN ANYAMAN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
25.	PT. BERDIKARI JAYA BERSAMA	WONOASIH	Solar Hsd	industri bahan kimia, barang dari kimia	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
26.	INTIPLAST	KANIGARAN	Cat dan Tinta Cetak	industri bahan kimia, barang dari kimia	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
27.	WAHANA TIRTA	KANIGARAN	Barang Plastik Lainnya Ytdl	industri bahan kimia, barang dari kimia	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
28.	PT. SUKSES TEKNIK INDONESIA	MAYANGAN	Mesin Pendingin, Wall Panel	industri barang galian bukan logam	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
29.	BENGKEL KONSTRUKSI RB	KADEMANGAN	Bak, Bak Kereta Gandeng, Kereta Tempel Flat Deck	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU, DAN ANYAMAN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH

30.	MEBEL RIDHO ANTIK , , CV	KADEMANGAN	Mebel dari Kayu	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU, DAN ANYAMAN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
31.	WIRA SENTOSA ABADI, PT	MAYANGAN	Jasa Perbaikan Kapal Laut	industri barang galian bukan logam	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
32.	PT. SINARMAS SURYA SEJAHTERA	KADEMANGAN	KECAP	INDUSTRI MAKANAN MINUMAN	20-99 Org	INDUSTRI MENENGAH
33.	BEE JAY SEAFOODS, CV	MAYANGAN	Frozen Fish Fillet	industri pengolahan hasil laut	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
34.	SOUTHERN MARI PRODUCTS, PT	KADEMANGAN	Frozen Fish Paste	industri pengolahan hasil laut	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
35.	SUKSES LAUTAN INDONESIA, PT	MAYANGAN	Ikan Beku	industri pengolahan hasil laut	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
36.	ANGKASA RIA INDAH ABADI, PT	MAYANGAN	Pakaian Jadi	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
37.	CAHAYA RESTU	KANIGARAN	CELANA	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
38.	ERATEX DJADJA TBK PT	KANIGARAN	Pakaian Jadi	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
39.	HANSIKA UNGGUL INDAH, PT	KANIGARAN	Baju Bordir	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
40.	VENITA	KANIGARAN	Jasa Jahit Pakaian	industri tekstil dan pakaian jadi	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
41.	SUMBER SETIA JAYA ABADI, PT	KADEMANGAN	Kulit Tersamak	industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
42.	BROMO FALCATA INDONESIA, PT	KADEMANGAN	Bare Core	industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
43.	GRAHA PAPAN LESTARI, CV	KEDOPOK	Bare Core	industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
44.	KUTAI TIMBER INDONESIA, PT	MAYANGAN	Plywood	industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
45.	PARTA BUANA SEJAHTERA	KADEMANGAN	Panel Kayu Lainnya	industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
46.	RIMBA SEMPANA INDONESIA, PT	KADEMANGAN	Albasia Barecore	industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
47.	INDOPHERIN JAYA, PT	KADEMANGAN	Phenolic Resin	industri bahan kimia, barang dari kimia	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
48.	PAMOLITE ADHESIVE INDUSTRY, PT	KADEMANGAN	Adhesive dan Formalin	industri bahan kimia, barang dari kimia	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
49.	AMAK FIRDAUS UTOMO, PT	MAYANGAN	Fiber/Asbes Semen	industri barang galian bukan logam	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR

50.	KERAMIK PAOLO	KADEMANGAN	Hotel Ware	industri barang galian bukan logam	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
51.	SUMBERTAMAN KERAMIKA INDUSTRI, PT	WONOASIH	Tempat Air dari Keramik	industri barang galian bukan logam	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR
52.	PT. PUTRATEJA SEMPURNA	KADEMANGAN	JASA JAHIT PAKAIAN JADI	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	≥ 100 Orang	INDUSTRI BESAR

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Probolinggo dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Percepatan peningkatan pendapatan perkapita dengan redistribusi pendapatan yang merata.
2. Percepatan pembangunan industri berbasis keunggulan lokal.
3. Pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, ketiga isu strategis tersebut dapat dirumuskan menjadi visi dan misi industrialisasi Probolinggo dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength – Weakness – Opportunity – Threat*), yang disinkronisasikan dengan beberapa dokumen perencanaan, antara lain: (i) visi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN, (ii) visi pembangunan industri provinsi Jawa Timur dalam RPIP, (iii) dokumen RPJPD Kota Probolinggo; serta (iv) dokumen RPJMD Kota Probolinggo.

Lebih lanjut, penajaman visi dan misi serta tujuan RPIK dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* melalui *focus group discussion* (FGD). *Stakeholder* yang terkait dalam FGD antara lain: (i) OPD *stakeholder* terkait bidang perindustrian di Probolinggo; (ii) pelaku industri termasuk Kadin; (iii) akademisi; dan (iv) legislatif.

Pada dasarnya, analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) adalah metode pengambilan keputusan kebijakan untuk masa depan berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dialami di masa kini dan di masa lalu. Identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dianggap sebagai faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman sebagai faktor negatif. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis dalam RPIK. Selanjutnya, visi dan misi RPIK Probolinggo ditetapkan berdasarkan hasil perumusan isu strategis.

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PROBOLINGGO

Perumusan visi RPIK Probolinggo disusun berdasarkan empat acuan. **Pertama**, mengacu pada visi pembangunan industri nasional. Visi pembangunan industri nasional tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang berbunyi:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Dari visi RIPIN Tahun 2015-2035 tersebut di atas, pengertian industri tangguh memiliki ciri-ciri antara lain: (i) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; (ii) industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan (iii) industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Tiga ciri tersebut mengindikasikan bahwa industri yang tangguh dalam pembangunan industri nasional adalah industri yang berkarakter inklusif dan berdaya saing yang berbasis inovasi dan teknologi. **Kedua**, RPIK Probolinggo juga harus selaras dan mengacu pada visi pembangunan industri Jawa Timur. Visi tersebut tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2017-2037 yang berbunyi:

“Jawa Timur Sebagai *Leading Smart Industrial Province*”.

Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam visi pembangunan industri Jawa Timur di atas, yakni: (i) *leading* (terkemuka), yang bermakna bahwa industri di Jawa Timur harus berdaya saing tinggi. Artinya, struktur industri harus mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, baik melalui penguatan struktur industri maupun peningkatan pangsa pasar domestik dan internasional. Tentunya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan baik melalui peningkatan pelestarian lingkungan, maupun peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam; dan (ii) *smart* (cerdas), yang dapat diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas industri. Artinya, pembangunan industri memiliki tujuan utama untuk mempercepat terwujudnya transformasi budaya masyarakat industri yang mengalir tanpa kendala berarti (*going smoothly*). Tentunya hal ini membutuhkan adanya kecerdasan dalam pengelolaan pembangunan industri (*smart industrial governance*). Visi pembangunan industri Jawa Timur tersebut juga sejalan dengan salah satu poin dalam visi RIPIN Tahun 2015-2045, yakni industri yang tangguh disusun atas industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Visi dalam RIPIN dan visi pembangunan industri Jawa Timur tersebut sama-sama menonjolkan adanya aspek daya saing industri.

Ketiga, penyusunan visi RPIK Probolinggo mengacu pada visi pembangunan Probolinggo, baik yang tertuang pada dokumen jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD). Dalam RPJPD Probolinggo tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Probolinggo berbunyi:

“Terwujudnya masyarakat Kota Probolinggo yang Aman, Demokratis, Adil, dan Sejahtera”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Probolinggo tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan Kota Probolinggo sebagai berikut: (1) memantapkan citra kota industri, perdagangan, pendidikan dan transportasi dan mewujudkan kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah. Kota Probolinggo akan terus dikembangkan sebagai kota industri, perdagangan dan transportasi karena posisinya yang sangat strategis dilihat dari koneksitasnya dengan kota-kota di wilayah Timur, Selatan dan Barat di Jawa Timur. Didukung juga oleh adanya fasilitas perhubungan darat dan laut yang cukup representatif. Sedangkan fokus sebagai kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah adalah bentuk kota idaman yang harus tetap diwujudkan mengiringi perkembangan kota sebagai kota metropolitan; (2) meningkatkan upaya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan memantapkan harmonisasi hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat; (3) Pembangunan Transportasi, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah, Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi; (4) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia; (5) meningkatkan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan, mewujudkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan iklim kewirausahaan yang sehat guna menunjang pertumbuhan perekonomian kota; (6) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (7) peningkatan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal; dan (8) memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sementara itu, dalam RPJMD Probolinggo tahun 2019-2024, visi pembangunan jangka menengah Probolinggo berbunyi:

“Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Probolinggo tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Probolinggo sebagai berikut: (1) pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial; (2) sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas; (3) infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan (4) tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Keempat, penyusunan visi pembangunan industri di Probolinggo mengacu pada isu strategis industrialisasi Probolinggo. Isu strategis industrialisasi Probolinggo dikelompokkan menjadi 3 (tiga) isu utama, yaitu: (i) percepatan peningkatan pendapatan perkapita dengan redistribusi pendapatan yang merata. Isu ini dilandaskan pada permasalahan utama terkait tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah, rendahnya pendapatan perkapita, dan angka pengangguran yang relatif tinggi. Pada posisi inilah sektor industri diharapkan mampu menjadi *prime mover* pertumbuhan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan distribusi yang merata; (ii) percepatan pembangunan industri berbasis keunggulan lokal. Isu ini didasarkan pada rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor industri; (iii) pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Isu ini didasarkan pada besarnya potensi konflik dalam pemanfaatan ruang.

Setelah menimbang potensi dan tantangan pengembangan industri di Probolinggo serta melakukan sinkronisasi beberapa dokumen perencanaan terkait dan atas hasil diskusi dengan beberapa *stakeholder*, maka visi pembangunan industri Probolinggo adalah:

“Menuju Kota Industri yang Tangguh dan Berkelanjutan”

Pada dasarnya, terdapat tiga kata kunci keberhasilan pencapaian visi tersebut, yaitu: (i) agropolitan, mengandung maksud bahwa pembangunan industri tidak terlepas dari keunggulan lokal yang berbasis sektor pertanian secara luas; (ii) tangguh, secara umum dapat diartikan mampu menciptakan kondisi yang kuat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dan mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat Kota Probolinggo; dan (iii) pengembangan metropolitan, memiliki makna bahwa terjadi peningkatan peran sektor industri melalui pengembangan kawasan metropolitan dalam meningkatkan perekonomian Kota Probolinggo.

Berlandaskan pada makna visi pembangunan industri Kota Probolinggo, maka ditetapkan misi industrialisasi Kota Probolinggo yaitu:

- a. Mewujudkan pendapatan perkapita yang inklusif.
- b. Mewujudkan industri yang berbasis keunggulan lokal.
- c. Mewujudkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PROBOLINGGO

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat empat tujuan RPIK, yaitu:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri;
2. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan pangsa pasar industri pada tingkat nasional dan internasional;
4. Menumbuhkan industri yang berbasis sumber daya daerah; dan
5. Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan

dan berwawasan lingkungan

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PROBOLINGGO

Berdasarkan tujuannya, RPIK Probolinggo memiliki dua sasaran industrialisasi. Pertama, sasaran kualitatif yang terdiri dari:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi;
2. Peningkatan daya beli masyarakat;
3. Peningkatan iklim usaha yang kondusif;
4. Peningkatan aktivitas industri;
5. Peningkatan penyediaan lapangan kerja di sektor industri;
6. Peningkatan ekspor;
7. Penguatan substitusi impor; dan
8. Peningkatan kualitas lingkungan kota yang berkelanjutan.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

1. Analisis *time series* dan *shift share* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi yang dipakai adalah skenario moderat.
2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait, seperti para pejabat serta pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dipilih sebagai target RPIK Probolinggo.

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kota Probolinggo, 2023-2043

No	Sasaran	Satuan	Baseline			2023	2029	2034	2039
			2020	2021	2022	2028	2033	2038	2043
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,64	4,06	6,12	6,19	6,26	6,32	6,38
2	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	33,59	34,66	34,99	39,48	43,22	46,96	50,70
3	Nilai Investasi Sektor Industri**) ¹⁾	Milyar Rp	100,44	105,5	267,960	272,70	276,65	280,60	284,55
4	Pertumbuhan PMTB	%	-5,76	1,57	2,92	3,18	3,22	3,25	3,29
5	Laju Pertumbuhan Industri**)	%	1,64	2,54	1,73	2,80	2,84	2,87	2,90
6	Kontribusi PDRB Sektor Industri Non Migas**)	%	14,46	14,67	14,59	14,71	14,78	14,84	14,90
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,7	6,55	4,57	3,77	3,11	2,45	1,79
8	Rasio Tenaga Kerja Sektor Industri	%	26,873	27,132	30,43	30,45	30,46	30,48	30,49
9	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri**)	Ribu Jiwa	32,072	33,084	37,541	37,60	37,64	37,69	37,74
10	Nilai Ekspor**)	Milyar Rp	216,65	231,65	917,1	917,27	917,43	917,59	917,76
11	Kontribusi Ekspor Terhadap PDRB	%	43,09	43,36	70,918	70,99	71,05	71,10	71,16
12	Kontribusi Impor Terhadap PDRB	%	50,7	49,45	31,710	31,63	31,57	31,50	31,43
13	IKLHD ²⁾	Indek	64,4	70,02	60,85	66,74	67,16	67,55	67,94

Catatan *) Target indikator telah disesuaikan dengan RPJMD

**) Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Dalam RPIP Jawa Timur

Sumber: Hasil Analisis

Pada dasarnya, indikator sasaran kuantitatif yang disepakati untuk digunakan adalah skenario moderat. Tabel 3.1 merupakan sasaran kuantitatif yang ditetapkan dalam RPIK. Selanjutnya, pencapaian indikator sasaran kuantitatif tersebut didasarkan pada enam asumsi, yaitu:

- (i). Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara 5-7% per tahun.
- (ii). Guncangan ekonomi (*shocks*) tidak bersifat fundamental.
- (iii). Perkembangan ekonomi global yang *predictable*.
- (iv). Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil.
- (v). Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD.
- (vi). Peran dan fungsi *e-government* berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kota Probolinggo, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Gambar 3.1 menunjukkan tema pembangunan industri Kota Probolinggo yang dibagi dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap RPIK Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2023 – 2028)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk percepatan peningkatan investasi di sektor industri. Dalam tahap ini, diharapkan terjadi peningkatan investasi baik dari dalam negeri ataupun asing. Sehingga, aktivitas ekonomi di Kota Probolinggo dapat lebih massif. Pada tahap ini, mulai dilakukan persiapan industrialisasi berbasis digital. Dimana, pengembangan *smart industry* berada pada fase persiapan (*basic*). Dua komponen yang disiapkan adalah: (i) E-raw material; dan (ii) SDM *adaptive*.

Tahap II (Tahun 2029 – 2033)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk memperkuat keunggulan produksi melalui penguatan penggunaan bahan baku lokal. Dalam tahap ini, dilakukan pula penguatan infrastruktur untuk pengembangan sektor industri, baik dengan penambahan fasilitas maupun perbaikan sarana prasarana eksisting. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong efektivitas kegiatan industri dan menurunkan biaya transaksi. Sementara itu, pengembangan *smart industry* pada tahap ini berada pada fase kesiapan awal/pengembangan (*basic-emerging*) dimana menekankan penguatan atas apa yang dikembangkan pada tahap sebelumnya, disertai dengan pemantapan sistem informasi yang mutakhir. Dengan kata lain, seluruh data mengenai industri telah terintegrasi secara mantap dalam Sistem Informasi Industri Provinsi dan Nasional.

Tahap III (Tahun 2034 – 2038)

Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan untuk memperkuat branding produk industri Kota Probolinggo. Hal ini dapat berjalan optimal ketika lebih melibatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam menunjang aktivitas industri. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan *smart industry* pada tahap ini telah berada pada tahap lanjut (*emerging-functional*) yang diharapkan mampu mengintegrasikan dua komponen, yaitu: (i) *Hi Tech Research*; dan (ii) *Integrated IT Market*.



Gambar 3.1
Tahapan Pembangunan Industri Unggulan di Kota Probolinggo

Tahap IV (Tahun 2039 – 2043)

Pembangunan industri pada tahap ini diharapkan telah memiliki kemampuan mengatasi perubahan iklim ekonomi global serta perkembangan digitalisasi. Percepatan perubahan ekonomi global haruslah diantisipasi secara tepat oleh industri dengan tidak mengabaikan konsep keberlanjutan yaitu tetap terjaganya fungsi kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Probolinggo. Pada tahap ini, industri baik skala kecil menengah dan besar telah cukup siap (*functional*) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Diharapkan pada tahapan ini Kota Probolinggo menjadi kota industri yang tangguh dan berkelanjutan.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan sasaran RPIK, agar industrialisasi dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan industri Probolinggo, juga memperhatikan konsep strategi pembangunan industri Jawa Timur dalam RPIP. Konsep strategi ini memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu: (i) penguatan daya saing melalui peningkatan produktivitas; (ii) pembiayaan usaha yang kompetitif agar terjadi penurunan risiko; dan (iii) perluasan pangsa pasar baik nasional maupun global melalui penguatan *networking*. Selanjutnya, ketiga pilar tersebut dikelola dalam bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital (ICT). Terdapat 13 (tiga belas) arahan strategi pembangunan industri Probolinggo yang terbagi dalam tiga pilar strategi pembangunan industri Probolinggo.

Pertama, penguatan daya saing melalui efisiensi, peningkatan produktivitas, dan inovasi. Melihat kondisi eksisting, maka peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam strategi produksi industrialisasi Kota Probolinggo. Gagasan ini didasarkan pada banyaknya industri eksisting, khususnya IKM yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, dengan peningkatan produktivitas, khususnya efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumberdaya, maka biaya transaksi dapat ditekan, sehingga mampu mendorong peningkatan produksi industri Probolinggo. Selain itu, penguatan inovasi penting dilakukan untuk memberikan ciri khas industri sehingga berbeda dengan produk lainnya. Terdapat enam strategi penguatan daya saing Kota Probolinggo, yaitu:

- (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya industri;
- (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana industri;
- (iii) Penguatan pola dan struktur perwilayahan industri (kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra IKM);
- (iv) Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) industri yang terintegrasi antara IKM dan IB; dan
- (v) Peningkatan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri hijau baik pada industri baru maupun industri eksisting.
- (vi) Penguatan infrastruktur pendukung pengembangan industri.

Kedua, peningkatan akses pembiayaan yang terjangkau melalui perluasan akses permodalan dan kerjasama. Peningkatan kepastian usaha bagi para pelaku ekonomi merupakan wujud dari efisiensinya biaya modal. Semakin efisien biaya modal di sektor industri, maka risiko usaha dapat semakin kecil. Efisiensi biaya modal menjadi penting, mengingat modal merupakan satu komponen vital dalam mendorong produktivitas industri. Pada titik ini, pemerintah hadir untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif. Setidaknya terdapat empat strategi penurunan risiko usaha, yaitu:

- (i) Peningkatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif;
- (ii) Penyediaan strategi afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- (iii) Penguatan komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi; dan
- (iv) Percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan digital teknologi.

Ketiga, peningkatan *networking* dan integrasi sektoral sebagai upaya perluasan pangsa pasar sektor industri. Strategi ini penting sebab banyak produk IKM Kota Probolinggo yang berkualitas namun tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Secara spesifik, terdapat tiga strategi peningkatan *networking* dan *branding*, yaitu:

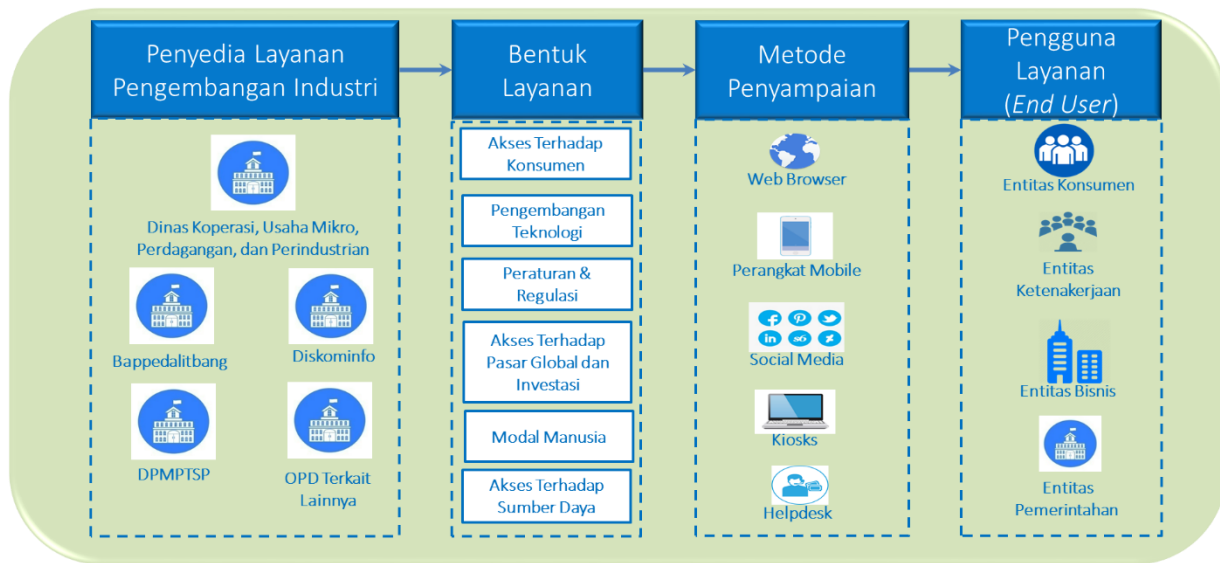
- (i) Pengintegrasian jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, maupun perluasan pemasaran, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional;
- (ii) Peningkatan kerjasama pada bidang pengembangan industri; serta
- (iii) Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Selain itu, sebagai upaya percepatan pengembangan IKM, strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Kota Probolinggo, meliputi:

1. Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. Peningkatan kualitas SDM IKM seiring dengan berkembangnya era digital;
3. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandarisasi;
5. Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. Peningkatan skala IKM;
7. Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. Pengembangan kemitraan dengan industri menengah dan besar; dan
9. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Selain tiga pilar strategi tersebut, strategi industrialisasi Kota Probolinggo akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ketika pemerintah mampu memanfaatkan peran teknologi, komunikasi, dan informasi dengan baik. Gambar 4.1. menunjukkan desain tata kelola industrialisasi Probolinggo kedepan. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan terjadi sinergitas antar penyedia layanan pengembangan industri. Pada sisi lainnya, digitalisasi juga mampu menurunkan biaya transaksi bagi pelaku industri sebab informasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Dimana, pengguna layanan dapat secara cepat dan terintegrasi memanfaatkan enam pokok layanan, yaitu:

- (i). aksesibilitas pada konsumen secara cepat dan akurat,
- (ii). desiminasi pengembangan teknologi secara inklusif,
- (iii). kebijakan dan peraturan yang transparan untuk diakses oleh semua pihak yang berkementingan,
- (iv). aksesibilitas pada pasar domestik dan global,
- (v). informasi tentang ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan
- (vi). aksesibilitas terhadap sumber daya lainnya, seperti keuangan dan bahan baku.



Gambar 4.1
Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Industrialisasi Digital

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Secara umum, bangun industri unggulan RPIK Probolinggo terdiri dari: (i) industri hulu, (ii) andalan, dan (iii) penunjang. Pada dasarnya, penetapan industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri di Kota Probolinggo. Dimana, metode penentuan industri unggulan didasarkan pada:

- (i). analisis keterkaitan antarsektor berdasarkan data PDRB lapangan usaha industri dan data pendukung untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri;
- (ii). analisis *Total Factor Productivity* (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri.

Dengan demikian, penetapan industri unggulan di Probolinggo didasarkan pada hasil evaluasi dua kinerja industri, yaitu: (i) kinerja industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*prime mover*), dan (ii) kinerja industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Selain menganalisis kinerja kondisi eksisting industri, penetapan industri unggulan Probolinggo juga didasarkan pada ekspektasi kedepan (*expert judgment*) terhadap industri yang berpotensi berkembang di Probolinggo. Industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan kedepan adalah industri yang mampu menjadi

motor penggerak bagi industri lainnya khususnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).

Setelah itu, hasil analisis industri unggulan Probolinggo diselaraskan dengan sepuluh industri prioritas nasional yang tertuang dalam RIPIN meliputi:

- a) Industri Pangan
- b) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
- c) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- d) Industri Alat Transportasi
- e) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- f) Industri Pembangkit Energi
- g) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- h) Industri Hulu Agro
- i) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- j) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Selain diselaraskan dengan industri prioritas nasional dalam RIPIN, analisis industri unggulan Probolinggo juga mempertimbangkan keselarasan dengan industri prioritas Provinsi yang tertuang dalam RPIP, yaitu:

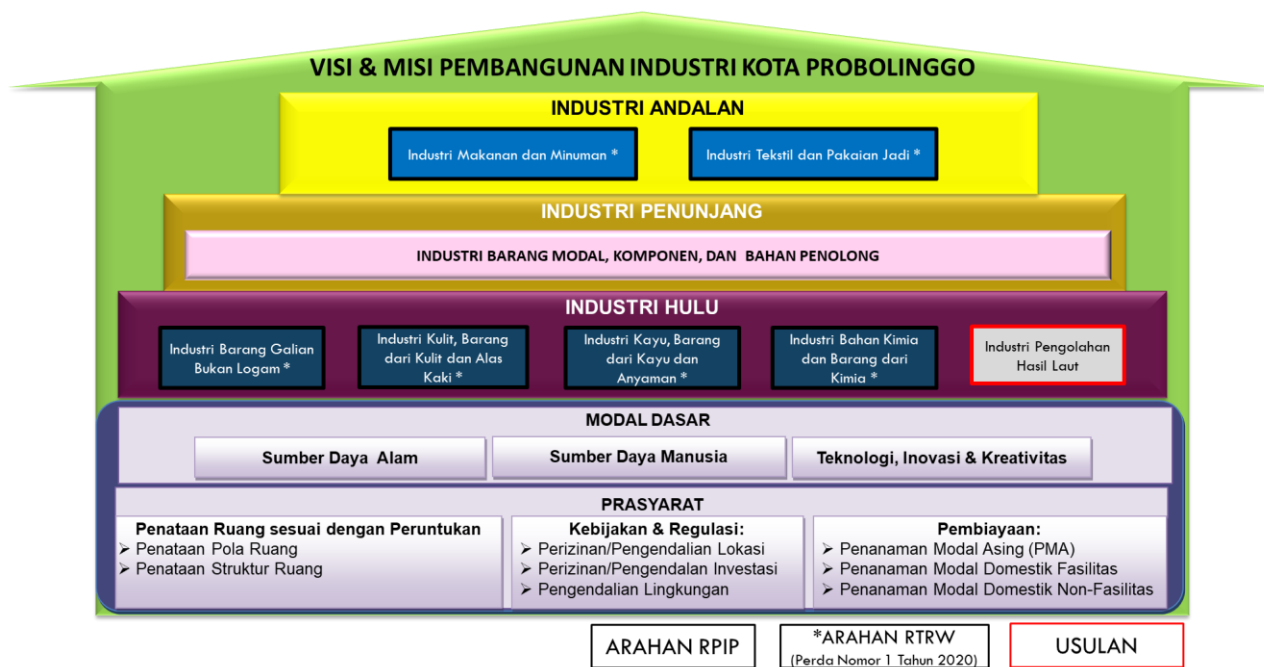
- a) Industri Pengolahan Daging dan Susu
- b) Industri Pengolahan Kopi dan Kakao
- c) Industri Pengolahan Hasil Laut
- d) Industri Pengolahan Kayu
- e) Industri Kimia Dasar
- f) Industri Barang Galian Bukan Logam
- g) Industri Logam Dasar
- h) Industri Barang Modal, Komponen dan Bahan Penolong
- i) Industri Makanan
- j) Industri Tekstil dan Alas Kaki
- k) Industri Kertas
- l) Industri Farmasi, Obat Kimia dan Tradisional
- m) Industri Barang dari Karet dan Plastik
- n) Industri Peralatan Listrik
- o) Industri Mesin dan Perlengkapan
- p) Industri Alat Angkut

Selanjutnya, hasil temuan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para pakar industri dan *stakeholder* terkait. Gambar 4.2 merupakan penetapan industri unggulan Kota Probolinggo yang dituangkan dalam bangun industri. Penguatan bangun industri Kota Probolinggo memerlukan modal dasar yang terdiri dari: (i) sumber daya alam, (ii) sumber daya manusia, dan (iii) teknologi sebagai basis inovasi dan kreativitas. Sedangkan, prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan

industri unggulan adalah penataan ruang, kebijakan dan regulasi serta pembiayaan.

Sebagaimana dapat dilihat pada bangun industri, terdapat 7 (Tujuh) industri unggulan yang dikembangkan di Probolinggo, yaitu:

- a) Industri Makanan Minuman
- b) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
- c) Industri Pengolahan Hasil Laut
- d) Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
- e) Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Anyaman
- f) Industri Bahan Kimia, Barang dari Kimia
- g) Industri Barang Galian Bukan Logam



Gambar 4.2 Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kota Probolinggo

Penetapan industri unggulan ini berdasarkan dari bahan baku lokal yang mendukung. Seperti halnya industri makanan berupa olahan ikan, kedelai, susu, jagung, dan mangga yang menjadi andalan karena produksi bahan baku melimpah. Sedangkan industri barang galian bukan logam, logam, kerajinan logam, dan bukan logam seperti batik tulis, bordir, anyaman plastik, dan keramik. Adapun program dan rencana pengembangan secara spesifik, Tabel 4.1 menguraikan tahapan pengembangan industri unggulan Probolinggo disertai dengan rencana aksinya.

Tabel 4.1
Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
1	INDUSTRI MAKANAN MINUMAN	Jenis Industri (KBLI)				Industri Besar: Mayangan, Kademangan, Kanigaran, Wonoasih Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Roti, kue, sirup, gula batu, gula merah, minuman dalam kemasan (Kode KBLI 107, 1079, 110)				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi termasuk penggunaan substitusi bahan baku				
		2. Peningkatan daya saing melalui pendampingan <i>packaging</i> yang dapat memasuki pasar luar negeri	1. Peningkatan diversifikasi produk	Perluasan pasar produk aneka makanan di pasar luar negeri	1. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri 2. Penguatan industri hijau	
		3. Peningkatan teknologi proses produksi	2. Peningkatan networking			
4. Peningkatan integrasi dengan kawasan pariwisata	3. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pembiayaan kompetitif					
5. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	4. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang					
6. Penguatan <i>branding</i> dan mutu produk						
2	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	Jenis Industri (KBLI)				Industri Besar: Mayangan, Kademangan, Kanigaran, Kedopok.
		Batik, kain rajutan dan sulaman, celana, baju (Kode KBLI 13134, 1391, 14)				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi	1. Peningkatan investasi	Perluasan pangsa pasar domestik dan luar negeri	Penguatan industri hijau	
2. Menjamin	2. Peningkatan teknologi proses produksi					

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
		ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	3.Peningkatan inovasi produk 4.Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 5.Peningkatan networking			Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
3	INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT	Jenis Industri				Industri Besar: Mayangan, Kademangan, Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Pengolahan hasil laut (Kode KBLI 10)				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi termasuk penggunaan substitusi bahan baku 2. Peningkatan daya saing melalui pendampingan packaging yang dapat memasuki pasar luar negeri 3. Peningkatan teknologi proses produksi 4. Peningkatan integrasi dengan kawasan pariwisata 5. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 6. Penguatan branding dan mutu produk	1. Peningkatan diversifikasi produk 2. Peningkatan networking 3. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pembiayaan kompetitif 4. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang	Perluasan pasar produk aneka makanan di pasar luar negeri	1. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri 2. Penguatan industri hijau	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
4	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI	Jenis Industri (KBLI)				Industri Besar: Kademangan. Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Pengolahan kulit (151)				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan inovasi produk 4.Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 5.Peningkatan networking	Perluasan pangsa pasar domestic	Penguatan industri hijau	
5	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN ANYAMAN	Jenis Industri (KBLI)				Industri Besar: Mayangan, Kademangan, Kedopok
		Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Industri Veneer, Kayu Lapis, Kayu Laminasi dan Sejenisnya, dan Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (Kode KBLI 161, 1621, 16291)				
		Rencana Aksi				

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 4. Peningkatan keterampilan IKM 5. Penguatan <i>brand image</i> dan mutu produk	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan inovasi produk 4.Peningkatan networking	Perluasan pangsa pasar	Penguatan industri hijau	Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
6	INDUSTRI BAHAN KIMIA, BARANG DARI KIMIA	Jenis Industri (KBLI)				Industri Besar: Kademangan, Kanigaran, Wonoasih Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Phenolic resin, lem, formalin, adhesive (Kode KBLI 20291)				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 4.Peningkatan networking	Perluasan pangsa pasar domestic	Penguatan industri hijau	
7	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	Jenis Industri (KBLI)				Industri Besar: Mayangan, Kademangan, Wonoasih Industri Kecil: Mengikuti pengembangan
		Keramik, guci, vas, pot (Kode KBLI 23929)				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan	Perluasan pangsa pasar	Penguatan industri hijau	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
		baku 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Peningkatan brand image dan mutu produk	networking			sentra IKM

Selanjutnya, program pengembangan setiap industri unggulan di Kota Probolinggo berbeda. Hal ini cukup beralasan mengingat masing-masing industri tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Agar lebih aplikatif, pelaksanaan program ini, dibagi dalam empat tahapan yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan industri. Penetapan program ini didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kota Probolinggo. Secara lebih spesifik, program pengembangan industri dapat dilihat pada tabel 4.2.1-4.2.10.

Tabel 4.2.1.
Pengembangan Industri Makanan Minuman
(Kode KBLI 107, 1072, 110)

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, kesehatan	Lembaga Sertifikasi Standarisasi produk makanan, Lembaga Penelitian Pengkajian Teknologi Farming (LP3TF)	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	V
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Pengutan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan sertifikasi halal)					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
11	Optimalisasi kemitraan dengan Lembaga Penelitian Pengembangan Pengkajian Teknologi Farming (LP3TF)					V	V	V	V
12	Penguatan penggunaan bahan baku alternatif					V			

Tabel 4.2.2.
Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
(Kode KBLI 13134, 1391, 14)

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
9	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
10	Penguatan branding IKM					V	V	V	V

Tabel 4.2.3.
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut
(Kode KBLI 10)

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemenuhan ketersediaan bahan	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, perikanan, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
9	Penguatan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan sertifikasi halal)					V	V	V	V
10	Peningkatan restrukturasi mesin industri					V	V	V	V
11	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
12	Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk hasil laut					V	V	V	V
13	Optimalisasi gudang penyimpanan hasil laut					V	V	V	V

Tabel 4.2.4.
Pengembangan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
(Kode KBLI 151)

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
9	Pengutan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan sertifikasi halal)					V	V	V	V
10	Peningkatan restrukturasi mesin industri					V	V	V	V
11	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.2.5.
Pengembangan Pengolahan Kayu, Barang Dari Bambu, dan Anyaman
(Kode KBLI 161, 1621, 16291)

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Pengutan branding IKM dan mutu produk					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.2.6.
Pengembangan Industri Bahan Kimia, Barang dari Kimia
(Kode KBLI 20291)

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	V
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguasaan teknologi dan informasi					V	V	V	V

Tabel 4.2.7.
Pengembangan Industri Pengolahan Barang Galian Bukan Logam
(Kode KBLI 239)

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemenuhan ketersediaan bahan	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Penguatan branding IKM dan mutu produk					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan program pengembangan wilayah industri di Probolinggo perlu memperhatikan RTRW dan dokumen perencanaan lainnya, seperti RIPIN, RPIP Jawa Timur dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat dua ruang lingkup pengembangan perwilayahan industri yang dapat diimplementasikan di Kota Probolinggo.

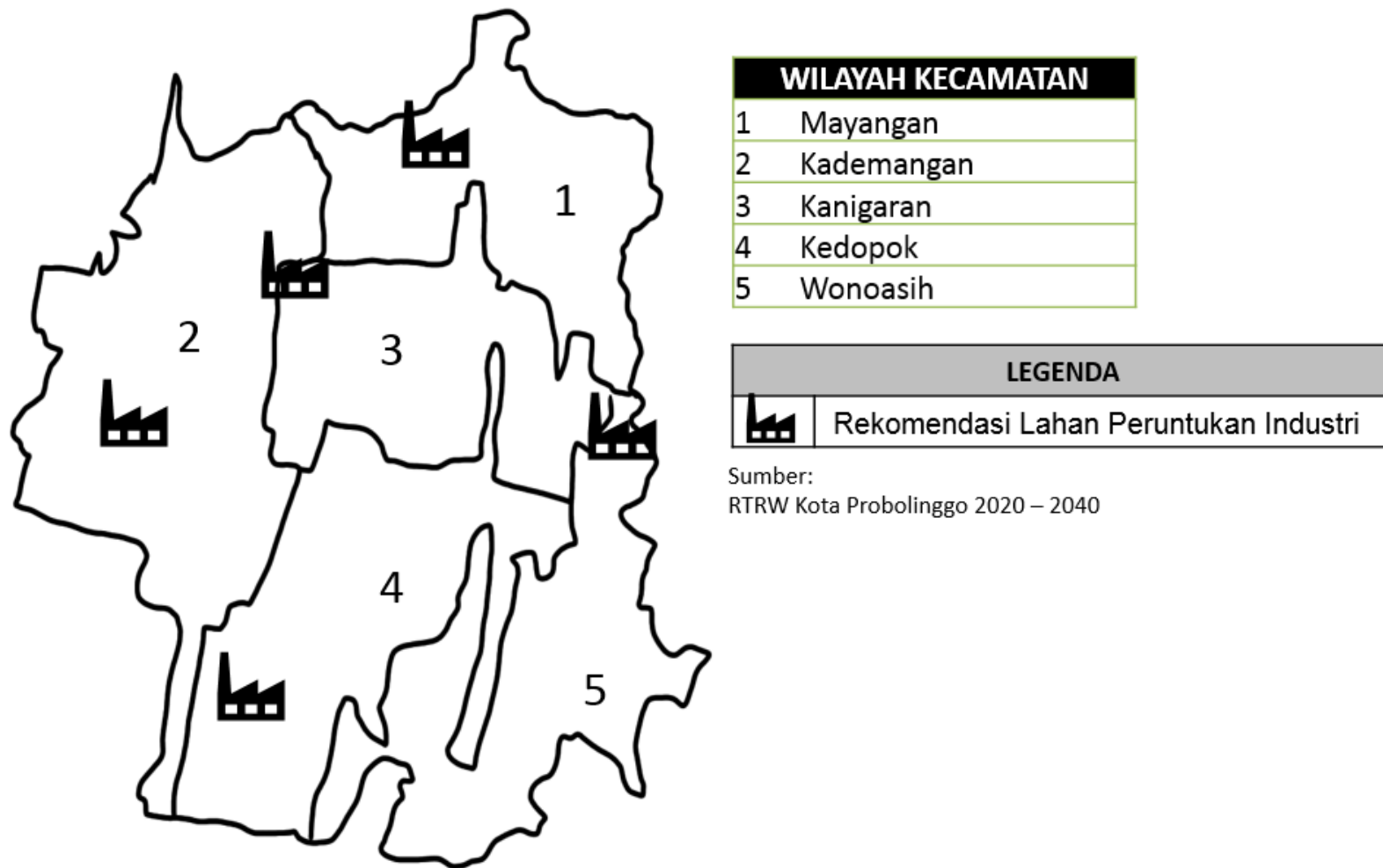
1. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Mengacu pada Permenperin No. 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, KPI ditetapkan dengan tiga kriteria yaitu: (i) berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; (ii) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau (iii) tidak mengubah lahan produktif. Paling sedikit, terdapat enam fasilitas infrastruktur yang harus disediakan dalam KPI, yaitu: (i) lahan industri yang tidak berada di kawasan rawan bencana berisiko tinggi; (ii) aksesibilitas yang memadai dan dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri; (iii) jaringan dan sumber air sebagai air baku industri dan air minum; (iv) badan air penerima limbah industri yang telah diolah, yang peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (v) sumber energi (gas, listrik, energi terbarukan, dan lainnya) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri; dan (vi) sistem dan jaringan telekomunikasi. Secara spesifik, program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.

Penetapan KPI harus bersinergi dan tidak terletak pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, dan ketahanan pangan. Syarat tersebut diperlukan sebab kedua sektor secara

teoritis tidak dapat berdampingan dalam wilayah yang sama. Jika terjadi pembangunan industri di daerah pertanian, maka menyebabkan industri akan terisolasi dan tidak berkembang secara optimal. Pada sisi lainnya, fungsi guna lahan pertanian akan turun disebabkan adanya industri. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011-2031 pada Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa Kota Probolinggo ditetapkan sebagai salah satu wilayah LP2B di Jawa Timur. Dengan demikian, penetapan KPI Kota Probolinggo harus dilakukan dengan kehati-hatian.

Pada sisi yang lain, secara umum, pembiayaan pengembangan perwilayahan industri dapat bersumber dari APBD, kerjasama antara pemerintah kota dengan swasta, BUMD dengan swasta, atau pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. Dalam hal ini, industri unggulan Kota Probolinggo sebagaimana dijelaskan pada bangun industri akan memperoleh insentif jika berlokasi dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Spesifik mengenai insentif yang dimaksud, selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Walikota. Meskipun demikian, pada dasarnya, industri unggulan dan non unggulan menengah dan besar wajib berlokasi di KPI.



Gambar 4.3.
Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam RPIK Probolinggo

Berdasarkan Gambar 4.3. terdapat lima lokasi yang ditetapkan sebagai Lahan Peruntukan Industri, dimana total luasan mencapai sekitar 321 ha. Dalam arahan tersebut lokasi KPI direkomendasikan pada: (i) jalan Brantas dan sekitarnya (kecamatan Kademangan dan Kanigaran); (ii) Jalan Anggrek, Jalan Belanak, Jalan PPI dan Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Mayangan; (iii) Jalan Soekarno Hatta di Kecamatan Kademangan; (iv) Jalan Prof, Dr. Hamka di Kecamatan Kedopok; dan (v) Jalan K.H Hasan Grenggong di Kecamatan Wonoasih

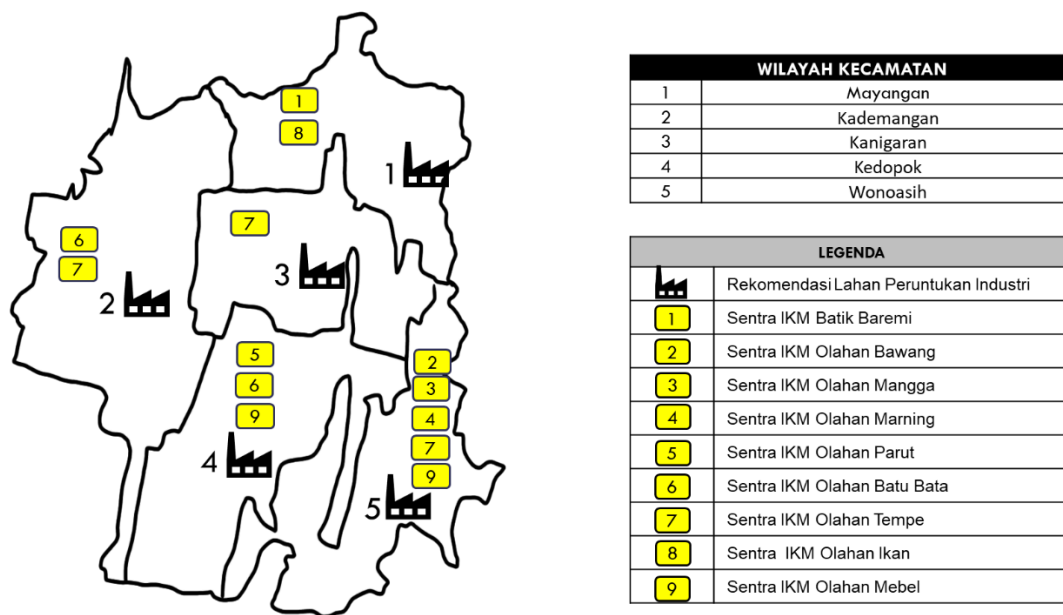
Dilihat berdasarkan lokasinya, penentuan KPI ini telah mempertimbangkan rencana pembangunan infrastruktur seperti (i) tol Probolinggo – Banyuwangi dan (ii) pengembangan pelabuhan. Kota Probolinggo berada pada posisi strategis baik dalam mobilisasi lajur darat dan laut. Sehingga, pengembangan KPI yang bersinergi dengan pengembangan infrastruktur diharapkan mampu berdampak positif bagi pengembangan industri di Kota Probolinggo.

Pada dasarnya, pelaku industri berhak melakukan aktivitasnya di beberapa daerah perwilayahan Kota Probolinggo namun dengan tetap mempertimbangkan lima aspek, yaitu: (i) tidak berada pada kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi; (ii) tidak berada pada lahan produktif, misalnya pertanian, perkebunan, pertambangan, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya; (iii) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (iv) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (v) wajib melakukan pengolahan limbah, baik padat, cair, maupun udara. Hal ini penting dilakukan agar minat berinvestasi di Probolinggo semakin besar dan izin investasi yang diajukan dapat direalisasikan.

2. Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi. Sedangkan pengembangan perwilayahan industri yang dimaksud dalam RPIK ini adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Dimana, penetapan SIKM lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan walikota.

Terkait sentra industri kecil dan menengah (SIKM), pemerintah daerah dapat membangun sentra IKM baik di dalam maupun di luar Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini dilakukan agar SIKM dapat mendukung pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Lebih lanjut dalam pembangunan industri di Kota Probolinggo, setiap kecamatan dapat diperuntukkan bagi pengembangan sentra IKM. Namun demikian pembangunan SIKM harus tetap memperhatikan tiga (3) syarat utama, yaitu: (i) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (ii) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (iii) wajib melakukan pengolahan limbah, dimana dapat dilakukan secara komunal. Berdasarkan hasil konsolidasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, sentra IKM Kampung Batik Baremi yang berkembang di Kota Probolinggo. Selengkapnya, peta sentra industri Kota Probolinggo dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4.
 Peta Sentra Industri Kota Probolinggo
 Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pada dasarnya terdapat tiga manfaat pembangunan sentra IKM, yaitu (i) menjadi bagian dari rantai pasok industri besar; (ii) mendorong kemandirian dalam peningkatan nilai tambah, dan (iii) penyerapan tenaga kerja. Adapun dalam penggunaan teknologi sektor industri dinas terkait yang membidangi teknologi pangan Kota Probolinggo melakukan kegiatan pelatihan, diseminasi olahan pangan, pemanfaatan hasil pertanian yang beragam, dan pemanfaatan olahan pangan lokal guna meningkatkan *value added*. Berdasarkan lingkup rencana pengembangan ruang atau Kawasan tersebut, Tabel 4.3.2 menunjukkan program pengembangan perwilayahan Sentra Industri Kota Probolinggo.

Tabel 4.3.1
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan KPI

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang tersinergi dengan sektor pertanian dan pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang	Kadin, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pengembangan KPI					V			
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI					V	V		
4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT					V	V	V	V
5	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KPI					V	V	V	V
6	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan zona sabuk hijau (green belt)					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
7	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI (jalan, kereta api, pelabuhan) dan penyediaan energi untuk mendukung pengembangan KPI					V	V	V	V
8	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri					V	V	V	V

Tabel 4.3.2
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan Sentra Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra Industri	Kementerian yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Komunitas Industri Kecil dan Menengah	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pembangunan Sentra Industri					V			
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan Sentra Industri					V	V	V	V
4	Penguatan Sentra Industri melalui peningkatan kelembagaan dan teknologi					V	V	V	V
5	Peningkatan promosi dan kerjasama antarsentra industri, baik pada tingkat regional maupun nasional					V	V	V	V
6	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT					V	V	V	V
7	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan					V	V	V	V
8	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Sentra Industri					V	V	V	V
9	Penguatan dukungan terhadap pembentukan show room/holding					V	V	V	V

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan program pembangunan sumber daya industri berdasarkan pada empat komponen analisis, yaitu: (i) analisis kebijakan pembangunan sumber daya industri Jawa Timur dan Kota Probolinggo; (ii) analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya industri baik skala nasional maupun provinsi; (iii) analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kota Probolinggo; dan (iv) analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Timur dan Kota Probolinggo.

Tabel 4.4.1 – tabel 4.4.6 menunjukkan program pengembangan sumber daya industri yang mengacu empat komponen dasar industrialisasi, yaitu: (i) pembangunan sumber daya manusia, (ii) pemanfaatan sumber daya alam, (iii) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, (iv) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, (v) penyediaan sumber pembiayaan, serta (vi) penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri.

Tabel 4.4.1
Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penguatan infrastruktur dalam sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja dan calon tenaga kerja sektor industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan	Dinas atau badan yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, pendidikan dan kebudayaan	LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah	V	V		
2	Penguatan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi					V	V		
3	Penguatan peran komunitas industri					V	V		
4	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun dalam bentuk <i>on the job training</i>					V	V	V	V
5	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)					V	V	V	V
6	Penguatan sinergitas antar stakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
7	Penguatan penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri					V	V	V	V
8	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM								

Tabel 4.4.2
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penyusunan rencana pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA termasuk SDA terbarukan dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT	Kementerian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perindustrian	Badan Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Lingkungan Hidup	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang	Lembaga Uji Mutu	V			
2	Survei pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing industri						V	V	V
3	Penguatan monitoring pemanfaatan dan kualitas SDA					V	V	V	V
4	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan					V	V	V	V
5	Pengutan penerapan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam					V	V	V	V

Tabel 4.4.3
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Komunikasi dan Informasi, DPMPSTP	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah, Pegiat Pengembangan TIK	V	V	V	V
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian					V	V	V	V
3	Penguatan monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri					V	V	V	V
4	Peningkatan penguasaan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan perkembangan era digital					V	V	V	V
5	Pelatihan desain dan penggunaan teknologi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT)					V	V	V	V
6	Penguatan audit teknologi terhadap teknologi yang dianggap tidak laik untuk industri industri (boros energi, berisiko bagi keselamatan dan keamanan, berdampak negatif pada lingkungan)					V	V	V	V

Tabel 4.4.4
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas R & D	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Komunikasi dan Informasi, DPMPTSP	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah, Pegiat Pengembangan TIK	V	V	V	V
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian					V	V	V	V
3	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual					V	V	V	V
4	Penguatan audit teknologi terhadap tekonologi yang dianggap tidak laik untuk industri industri (boros energi, berisiko bagi keselamatan dan keamanan, berdampak negatif pada lingkungan)					V	V	V	V
5	Penyediaan ruang dan wilayah untuk kreativitas dan inovasi					V	V	V	V
6	Penguatan pengembangan sentra industri kreatif					V	V	V	V
7	Penguatan dukungan terhadap penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.4.5
Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Komunikasi dan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan	BPR Daerah, Kadin	V	V	V	V
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA	Informasi, Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan	Komunikasi, BUMD Sektor Perbankan dan Keuangan	informatika, investasi, tenaga kerja		V	V	V	V
3	Peningkatan inklusi keuangan					V	V	V	V

Tabel 4.4.6
Penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pemetaan wilayah penyediaan bahan baku dan/atau penolong	Kementerian yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Kominfo, Koperasi dan UMKM	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja	Pusat penyedia bahan baku dan/atau penolong, lembaga pelaksana verifikasi	V	V		
2	Pengenalan penggunaan bahan baku dan/atau penolong alternatif					V	V	V	V
3	Penguatan dukungan pembangunan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam					V	V	V	V
4	Penyusunan data dan informasi mengenai kebutuhan dan pasokan bahan baku dan/atau penolong untuk industri secara terinci dan terverifikasi melalui sistem informasi yang terintegrasi (seperti SIINas dan INATRADE)					V	V	V	V
5	Penguatan kebijakan yang mendukung penyaluran bahan baku dan/atau penolong					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
6	Penetapan tata kelola bahan baku dan/atau penolong					V	V		
7	Penguatan dukungan pembangunan pusat penyedia bahan baku dan/atau penolong bagi industri kecil dan menengah					V	V	V	V

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berdasarkan analisis kebutuhan industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri Kota Probolinggo terdiri dari enam aspek, meliputi: (i) pembangunan sumber daya energi dan kelistrikan (lihat Tabel 4.5.1); (ii) pembangunan sumber daya air (lihat Tabel 4.5.2); (iii) pembangunan sarana dan prasarana pengolahan lingkungan dan fasilitas sanitasi termasuk limbah (lihat Tabel 4.5.3); (iv) pembangunan transportasi (lihat Tabel 4.5.4); (v) pengembangan penunjang sistem informasi industri (lihat Tabel 4.5.5); dan (vi) pengembangan penunjang standardisasi industri (lihat Tabel 4.5.6).

Tabel 4.5.1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Energi dan Kelistrikan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pertamina, PLN	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan		V			
2	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri					V	V		
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi					V	V		
4	Pengembangan sumber energi yang terbarukan					V	V	V	V
5	Penguatan kebijakan diversifikasi dan konservasi energi					V	V	V	V
6	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government					V	V	V	V

Tabel 4.5.2.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Optimalisasi pemanfaatan DAS dan bendungan	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, lingkungan hidup, perhubungan, PU dan penataan ruang	PDAM	V	V		
2	Optimalisasi penyediaan air bersih							V	V

Tabel 4.5.3.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Lingkungan dan Fasilitas Sanitasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Peningkatan pembangunan fasilitas sanitasi (SPAL dan limbah B3) di seluruh KPI dan Sentra Industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, lingkungan hidup, perhubungan, Kesehatan, PU dan penataan ruang		V			
2	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Industri secara komunal					V	V		
3	Penguatan komitmen dalam pengelolaan limbah					V			
4	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah					V	V		
5	Penguatan sistem drainase baik makro maupun mikro					V	V	V	V

Tabel 4.5.4.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penetapan rencana konektivitas antarKPI, Sentra Industri dengan daerah pemasaran	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, lingkungan hidup, perhubungan, PU dan penataan ruang		V	V		
2	Peningkatan kualitas infrastruktur pada wilayah KPI dan Sentra Industri sesuai dengan RTRW							V	V
3	Pengembangan jalan sebagai penghubung antar kawasan					V	V	V	V
4	Pengembangan jalan lokal sebagai penghubung antara Kawasan penunjang industri					V	V	V	V
5	Pengembangan pelabuhan sebagai sarana peningkatan mobilitas barang antar Daerah					V	V	V	V

Tabel 4.5.5.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government (Mendukung SIINas)	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Dalam Negeri	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi,	Kadin	V	V	V	
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri					V	V	V	
3	Peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola sitem informasi industri					V	V		
4	Pengembangan model sistem industri, <i>decision support system, expert system, business intelligence</i> , dan <i>knowledge management industry</i>						V	V	V

Tabel 4.5.6.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri dalam menerapkan standardisasi dan sertifikasi	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Riset dan Teknologi, Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Standarisasi Nasional	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, perhubungan	Perguruan Tinggi	V	V	V	
2	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri						V	V	V
3	Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001						V	V	V

5. Program Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Baik pada tatanan provinsi maupun kabupaten/kota, kebijakan pemberdayaan IKM tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri unggulan; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Selanjutnya, kebijakan di Probolinggo berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM RPIP Jawa Timur yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM Nasional. Pertama, pembentukan *holding* atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.

Kedua, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, di lain sisi juga memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari tahapan produksi maupun pasca produksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

Berdasarkan pemahaman dua konsep tersebut, terdapat lima jenis pembinaan IKM, yaitu: (i) bantuan alat, (ii) pendampingan, (iii) peningkatan kualitas SDM, (iv) peningkatan kapasitas teknologi, dan (v) bimbingan standarisasi dan sertifikasi termasuk di dalamnya *packaging* dan perlindungan HKI.

Dalam kondisi eksisting, IKM di Probolinggo telah memiliki produk unggulan yang spesifik. Terdapat 4 (empat) kategori dalam menetapkan produk unggulan, yakni berdasarkan kompetensi inti, *One Village One Product* (OVOP), industri kreatif, dan industri agro. Namun demikian, penetapan produk unggulan mengacu pada kesepakatan di tiap daerah dimana penetapan tersebut dapat diperbarui Dinas atau badan yang membidangi urusan Perdagangan dan Industri di Provinsi Jawa Timur setiap dua tahun sekali. Dengan demikian, penyusunan program pemberdayaan IKM dilakukan berdasarkan hasil analisis tentang: (i) analisis potensi daerah; (ii) analisis eksisting pengembangan IKM Kota Probolinggo; (iii) analisis sinkronisasi tujuan pencapaian industrialisasi; dan (iv) prediksi pertumbuhan makro ekonomi dan industri Kota Probolinggo. Tabel 4.6 menunjukkan program pemberdayaan IKM di Kota Probolinggo.

Tabel 4.6.
Pemberdayaan IKM

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun				
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043	
1	Penguatan kelembagaan IKM sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk meningkatkan skala ekonomis dan pemasaran Bersama	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dalam Negeri	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu	Dinas atau badan yang membidangi urusan	Lembaga Pendidikan dan Litbang, KADIN, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, BPR Daerah	V				
2	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi profesi			Dinas atau badan yang membidangi urusan		pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan	V	V	V	V
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM			Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu		informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan	V	V	V	V
4	Peningkatan dan pemberian insentif sesuai kewenangan daerah untuk mendorong keterkaitan/kemitraan IKM dengan industri menengah-besar dan tumbuhnya wirausaha baru			hidup, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan desa			V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Daerah	Lainnya	2023 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2043
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan usaha yang kompetitif untuk meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan					V	V	V	V
6	Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM					V	V	V	V
7	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM unggulan					V	V	V	V
8	Peningkatan kerjasama IKM dengan stakeholders industri, seperti lembaga pendidikan dan litbang, KADIN, asosiasi industri, dan asosiasi profesi					V	V	V	V
9	Penguatan branding IKM dan networking melalui diseminasi informasi dan pemasaran bagi perluasan pasar IKM					V	V	V	V

V. PENUTUP

Penyusunan RPIK Probolinggo merupakan keharusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di samping itu, penyusunan RPIK Probolinggo berguna sebagai pedoman dan acuan seluruh OPD yang terkait dengan pembangunan sektor industri di Probolinggo.

Sampai saat ini, sektor industri Kota Probolinggo perlu dilakukan percepatan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perkapita yang inklusif dengan arah pengembangan industri yang berbasis keunggulan lokal. Pada akhirnya, pembangunan industri di Kota Probolinggo diorientasikan untuk mewujudkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka panjang, RPIK Probolinggo harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya dan selanjutnya dapat dievaluasi untuk mendapatkan perbaikan setiap lima tahun sekali.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS